

**Pengakuan
atau Penundaan?
Babak Penentuan
UU Masyarakat Adat**

**RUU Masyarakat Adat
Menuju Garis Akhir?
Dari Parlemen hingga
Kampung-Kampung**

**Masyarakat Adat dalam
Perspektif Hak Asasi Manusia:
Dari Instrumen Hukum Internasional
sampai dengan Urgensi
Pengakuan Hukum Nasional**





Susunan Redaksi

Penanggung Jawab

Sekretaris Jenderal AMAN
Rukka Sombolinggi

Pimpinan Umum

Deputi I Sekjen AMAN
Urusan Organisasi
Eustobio R. Renggi

Pemimpin Redaksi

Direktur Infokom PB AMAN
Titi Pangestu

Redaktur Pelaksana

Niccolo Attar

Kepala Newsroom AMAN

Apriadi Gunawan

Redaktur Bahasa

Muamar Fikrie

Desain & Tata Letak

Taqi

Koordinator Foto

Giat Perwangsa & Chresly Vikario Y. Tumengkol.

Kontributor

Sepriandi, JMA dari Bengkulu; Maruli Simanjuntak, JMA dari Tano Batak; Komang Era Patrisya, JMA dari Bali; Hikmawan Pasalo, Manager Riset AMAN; Yosis Sentris Lilihata, JMA dari Maluku; Umbu Ch Nusa Mesa, JMA dari Sumba, NTT; Oktovianus Amkark, Anggota BPAN Moi Salkma; Arnol Prima Burara, JMA dari Tana Toraja, Sulsel; Ridhoino Kristo Sebastianus Melano, JMA dari Kalbar; Abdi Akbar, Delegasi AMAN di LCAW 2026; Rainny Situmorang, Delegasi AMAN di LCAW 2026; Nesta Makuba, JMA dari Papua; Muh. Nurji, JMA dari NTB.

Distribusi

Jeki Angkat & Awaluddin (Dir. OKK)

Alamat Redaksi

Rumah AMAN
Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12820

(021) 829 7954/837 06282

rumahaman@aman.or.id

Media Sosial

@AliansiMasyarakatAdatNusantara

@RumahAMAN

@rumah.aman

AMAN - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara -

Podcast Radio Gaung AMAN

www.radio.aman.or.id

"Radio Gaung AMAN"

Portal Berita AMAN.or.id

AMAN.or.id

04



Pengakuan atau Penundaan?
Babak Penentuan UU Masyarakat Adat

08



RUU Masyarakat Adat
Menuju Garis Akhir?
Dari Parlemen hingga
Kampung-Kampung

13



Masyarakat Adat dalam
Perspektif Hak Asasi Manusia:
Dari Instrumen Hukum Internasional
sampai dengan Urgensi
Pengakuan Hukum Nasional

18



Tiga Negeri
di Seram Utara
Tolak Penetapan
Taman Nasional
Manusela



22



**Tarik Batu Kubur:
Tradisi Megalitik
Masyarakat Adat Sumba
yang Merawat
Solidaritas & Identitas**

26



**Pemuda Adat Papua Konsolidasi
di Wilayah Adat Moi Kelim,
Perkuat Barisan Hadapi Ancaman
terhadap Wilayah Adat**

**Perempuan Adat
Penyandang Disabilitas
Desak Pengesahan
RUU Masyarakat Adat
di Konferensi ADF Toraja**

29



40



**Elisabeth Pimpin
BPAN 2026-2030,
Sekjen AMAN:
Amanah dari Leluhur**

32



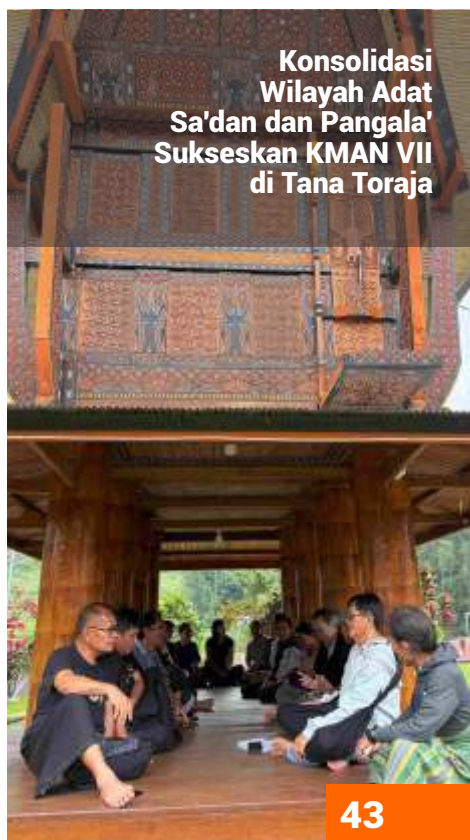
**Delegasi AMAN
Warnai London Climate
Action Week 2026**

**AJMAN Suku Mairasi
Melatih Pemuda
di Kampung Menjadi
Jurnalists Masyarakat Adat**

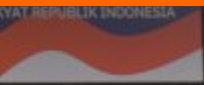
37



**Konsolidasi
Wilayah Adat
Sa'dan dan Pangala'
Sukseskan KMAN VII
di Tana Toraja**



43



BADAN LEGISLASI DPR RI



Pengakuan atau Penundaan? Babak Penentuan UU Masyarakat Adat

Oleh: **Rukka Sombolinggi**, Sekretaris Jenderal AMAN.

*Perwakilan Masyarakat Adat dan Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat berfoto bersama di Badan Legislatif DPR RI sambil menyerukan percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat.
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.*

Delapan belas tahun. Itu bukan sekadar angka dalam kalender legislasi. Itu adalah delapan belas tahun anak-anak adat lahir dan besar tanpa kepastian bahwa tanah leluhurnya akan tetap ada saat mereka dewasa. Delapan belas tahun kampung-kampung menunggu, sementara konsesi terus dibagikan, patok terus ditancapkan, dan warga Masyarakat Adat terus dikriminalisasi karena mempertahankan apa yang sudah menjadi milik mereka jauh sebelum republik ini berdiri.

Maka ketika delegasi AMAN berdiri di hadapan Badan Legislasi DPR RI pada 1 April lalu, kami tidak datang untuk meminta belas kasihan. kami datang untuk menagih janji. Masyarakat Adat menjaga 80 persen ekosistem terbaik yang tersisa di bumi ini, bukan karena diperintah negara, tetapi karena itu adalah cara hidup kami. Ekosistem itu akan hancur ketika negara terus menunda pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat. Ini bukan lagi soal agenda legislasi semata. Ini soal keselamatan bangsa.



Empat bulan terakhir memberi sesuatu yang jarang dirasakan Masyarakat Adat selama dua dekade ini: gerak. Baleg DPR RI turun ke Bali, ke Sumatera Barat, ke Tano Batak mendengar langsung, bukan lewat dokumen yang disaring birokrasi. Di Bali, seorang gubernur menyatakan dukungannya secara terbuka. Di Tano Batak, seorang tetua adat dari Sihaporas berbicara tanpa basa-basi tentang kriminalisasi yang dialami komunitasnya, di hadapan wakil ketua Baleg. Di Toba, tercatat angka yang seharusnya membuat semua pihak malu: 43 warga adat dikriminalisasi hanya dalam empat tahun terakhir, sementara 29 kampung adat hasil pemetaan partisipatif masih tumpang tindih dengan konsesi perusahaan. Tiga periode kepala daerah berganti sejak peraturan daerah disahkan, dan belum satu komunitas pun memperoleh pengakuan resmi.

Inilah wajah asli dari penundaan: bukan sekadar rancangan yang belum disahkan, tetapi ruang hidup yang terus dirampas selama negara berdebat.

Dan penundaan itu tidak berhenti di meja parlemen. Ia terjadi di lapangan, hari demi hari. Di Seram Utara, tiga negeri, Manusela, Maraina, Hatuolo harus turun ke jalan hanya untuk menolak tapal batas taman nasional yang dipasang sepihak, tanpa musyawarah, tanpa FPIC (*Free Prior and Informed Consent*). Tetua adat Manusela mengatakan hal yang sederhana namun menusuk: mereka memiliki tanah itu sebelum ada Balai Taman Nasional. Kalimat itu seharusnya cukup untuk mengakhiri perdebatan. Tapi rupanya belum.

Di tengah semua ini, ada satu hal yang menguatkan: Masyarakat Adat tidak lagi hanya menunggu. Pemuda Adat di Papua berkonsolidasi di wilayah adat Moi Kelim, menegaskan komitmen mereka untuk mengelola sumber daya secara mandiri dan tidak lagi bergantung pada pihak luar. Perempuan Adat penyandang disabilitas menyuarakan tuntutan mereka di forum ADF Toraja, mengingatkan bahwa pengakuan Masyarakat Adat yang diperjuangkan harus mencakup mereka yang berada di persimpangan kerentanan paling berlapis. Jurnalis-jurnalis muda di Papua Barat dilatih menulis kisah kampungnya sendiri, karena Masyarakat Adat tidak lagi mau cerita mereka disampaikan secara keliru oleh pihak lain. Dan di London, dalam forum-forum iklim dunia, AMAN menegaskan bahwa Masyarakat Adat bukan objek pendanaan, melainkan investor sejati bagi keselamatan bumi.

Semua ini adalah satu gerakan yang sama, dengan satu tuntutan yang sama: pengakuan, bukan penundaan.



Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi bersama Ketua Dewan AMAN Nasional S. Masiun sedang menghadiri RDPD di DPR RI pada Rabu, 1 April 2026.

Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.



Menuju 81 tahun kemerdekaan, AMAN mendesak negara agar pesan ini didengar dengan jelas: naskah akademik RUU Masyarakat Adat sudah disusun sejak 2008. Sudah dibawa ke kampung-kampung, ke kampus-kampus, ke forum pengambil keputusan. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Tidak ada lagi ruang untuk meragukan. RUU ini mewakili situasi batin Masyarakat Adat dan situasi batin bangsa Indonesia yang sesungguhnya.

Pengesahan UU Masyarakat Adat bukan sekadar tindakan legislatif. Ia adalah pelunasan janji kemerdekaan kepada subjek hukum tertua di Nusantara. Negara tidak perlu menciptakan Masyarakat Adat, kami sudah ada jauh sebelum NKRI berdiri. Negara hanya perlu memberi pengakuan.

Babak ini sedang menentukan. Dan Masyarakat Adat akan terus hadir di parlemen, di kampung, di forum dunia sampai pengakuan itu yang menjadi kata akhir.



Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi menyampaikan pandangan dalam RDPU Baleg DPR RI, menegaskan bahwa Masyarakat Adat datang untuk menagih janji pengakuan melalui RUU Masyarakat Adat.

Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.



Suasana pertemuan kunjungan kerja Baleg DPR RI dengan Gubernur Kalimantan Barat dan jajarannya. Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.

RUU Masyarakat Adat Menuju Garis Akhir? Dari Parlemen hingga Kampung-Kampung

Kontributor:

Sepriandi, Jurnalis Masyarakat Adat dari Bengkulu.
Maruli Simanjuntak, Jurnalis Masyarakat Adat dari Tano Batak.
Komang Era Patrisya, Jurnalis Masyarakat Adat dari Bali.

Setelah hampir dua dekade mandek di Program Legislasi Nasional, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat kini bergerak dengan tempo yang berbeda. Sepanjang April hingga Mei 2026, Badan Legislasi DPR RI menyambangi wilayah-wilayah adat — dari Bali hingga Tano Batak — untuk menyerap aspirasi langsung dari komunitas yang paling lama menunggu. Sementara di Senayan, tuntutan yang sudah mengeras sejak 1999 akhirnya mendapat ruang di meja parlemen.

Janji yang Harus Dilunasi

Pada Rabu, 1 April 2026, Gedung Parlemen Senayan menjadi saksi pernyataan paling tegas yang pernah disampaikan Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi di hadapan Badan Legislasi DPR RI. Di hadapan anggota Baleg, perwakilan Dewan AMAN Nasional, delegasi Pemuda Adat, PEREMPUAN AMAN, dan 48 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat, Rukka membingkai pengesahan RUU ini bukan sekadar agenda legislasi, melainkan soal keselamatan bangsa.



"Masyarakat Adat menjaga 80 persen ekosistem terbaik yang ada di dunia dan ini akan hancur ketika tidak ada pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat. Untuk itu, kami berharap mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini Undang-Undang Masyarakat Adat sudah disahkan," kata Rukka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum itu.

Rukka juga mengingatkan bahwa naskah akademik RUU ini sudah disusun sejak 2008, didiskusikan di kampung-kampung, kemudian dibawa ke forum-forum pengambil keputusan di seluruh kampus negeri di Indonesia.

"Sudah dibawa ke forum pengambil keputusan, sudah dibawa ke forum diskusi publik. Sehingga pengesahan RUU Masyarakat Adat ini tidak perlu ditunda lagi, tidak perlu lagi diragukan, karena ini mewakili situasi batin Masyarakat Adat dan kita semua bangsa Indonesia," tegasnya.

Perwakilan Masyarakat Adat dari berbagai wilayah turut berbicara dalam forum itu. Anton Yohanis Bala, utusan Masyarakat Adat Sikka dari Nusa Tenggara Timur, meluruskan narasi bahwa Masyarakat Adat adalah hambatan investasi.

"Tanpa pengakuan Masyarakat Adat, investasi menjadi tidak pasti, berisiko tinggi, berbiaya mahal. Konflik agraria, tumpang tindih lahan, hal itu karena hak kami tidak diakui sejak awal. Kami ingin pembangunan berjalan, kami ingin investasi masuk, tapi kami juga ingin dihormati sebagai pemilik yang sah atas ruang hidup kami," ungkapnya.

Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menutup pertemuan itu dengan komitmen yang dinantikan banyak pihak. "Kami pimpinan dan seluruh anggota Baleg DPR RI memohon doa serta dukungan dari seluruh Masyarakat Adat di Nusantara agar Undang-Undang Masyarakat Adat dapat segera disahkan," katanya.

Ketua Badan Legislasi, Bob Hasan merespon pandangan Masyarakat Adat dalam RDPU bersama Badan Legislasi DPR RI terkait urgensi pengesahan RUU Masyarakat Adat. Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.



Baleg Turun ke Daerah: Bali dan Tano Batak Bersuara

Memasuki Mei 2026, Baleg DPR RI memperluas proses penyerapan aspirasi ke tiga provinsi: Bali, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Di ketiga wilayah ini, sistem hukum adat masih hidup dan diakui masyarakat sebagai bagian nyata dari kehidupan sehari-hari.

Di Bali, kunjungan Baleg pada 7 Mei 2026 disambut Gubernur I Wayan Koster yang memberikan dukungan tegas. "Bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar jika adat istiadat, tradisi dan budayanya dijaga dengan baik," kata Koster. Di forum yang sama, Ketua Pelaksana Harian AMAN Wilayah Bali Jro Pasek Putu Srengga mengingatkan bahwa dua dekade sudah terlalu lama.

"Kami meminta agar proses ini terus dikawal hingga disahkan oleh DPR RI," tegasnya.

Putu Ardana, Ketua Dewan AMAN Wilayah Bali, menambahkan dimensi yang lebih dalam. Menurutnya, RUU ini harus mengubah paradigma pengakuan yang selama ini bersyarat, berlapis, dan birokratis menjadi pengakuan yang sederhana, deklaratif, dan terpadu.

"Mengesahkan RUU Masyarakat Adat bukan sekadar tindakan legislatif, ini adalah pelunasan janji kemerdekaan kepada subyek hukum tertua di Nusantara, Masyarakat Adat," tegasnya.



*Anggota Badan Legislasi DPR RI bersama Gubernur Bali dan tokoh Masyarakat Adat berphoto bersama usai melakukan pertemuan di kantor Gubernur Bali pada Kamis, 7 Mei 2026..
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.*



Akademisi Prof. Windia dari Bali menyoroti satu kelemahan yang perlu diperhatikan dalam substansi RUU: ruang yang nyaris tidak tampak bagi daerah untuk menampilkan karakter khasnya masing-masing. Ia berharap ketentuan hukum nasional tidak menghapus kekhasan lokal. "Hendaknya jangan negara Mawatata ini menghilangkan Bali Mawacara," harapnya.

Dua hari kemudian, pada 9 Mei 2026, Baleg bergerak ke Tano Batak. Di sini, suara yang terdengar lebih tajam karena lahir dari luka yang masih segar. Mangitua Ambarita, tokoh adat dari Sihaporas yang komunitasnya selama bertahun-tahun berhadapan langsung dengan PT Toba Pulp Lestari, berbicara tanpa basa-basi di hadapan Wakil Ketua Baleg Martin Manurung.

"Kami butuh Undang-Undang Masyarakat Adat untuk melindungi kami dari segala bentuk kriminalisasi," kata Mangitua.

Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, yang turut hadir dalam pertemuan di Tano Batak, menempatkan RUU ini dalam kerangka yang lebih luas. "Masyarakat Adat telah menjaga keseimbangan sosiologis sebelum masa modern dikenal tanpa harus menuliskannya dalam teori pembangunan. Karena itu pembahasan Masyarakat Adat bukan hanya tentang regulasi, tetapi bagaimana modernisasi tidak memutus budaya bangsa sendiri," ujarnya.



Perwakilan Masyarakat Adat menyampaikan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap sistem pemerintahan serta hukum adat yang telah hidup dan dijalankan secara turun-temurun.
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.



Delapan Belas Tahun Terlalu Lama

Ketua Pelaksana Harian AMAN Wilayah Tano Batak Jhontoni Tarihoran memaparkan data yang mencengangkan. Di Kabupaten Toba, tiga periode kepala daerah telah berganti sejak Perda disahkan pada 2020, namun belum satu pun komunitas Masyarakat Adat memperoleh pengakuan resmi. Sedikitnya 29 kampung adat hasil pemetaan partisipatif seluas sekitar 37.000 hektare kini tumpang tindih dengan konsesi perusahaan. Antara 2022 hingga 2026, 43 anggota Masyarakat Adat dikriminalisasi karena mempertahankan tanah leluhur mereka.

"Prioritas pemerintah sering kali lebih berpihak pada industri, sementara Masyarakat Adat justru disingkirkan dari tanah leluhurnya," kata Jhontoni.

Ia mendesak agar prosedur pengakuan disederhanakan tanpa menghilangkan substansi. Negara, menurutnya, tidak perlu lagi mempersulit pengakuan komunitas yang secara konstitusional telah diakui keberadaannya.

"Kami tidak ingin keberadaan Masyarakat Adat dievaluasi seolah-olah harus dibuktikan kembali, karena kami tumbuh secara alami jauh sebelum negara ini berdiri," ujarnya.

Kepala BRWA Sumatera Roganda Simanjuntak menyodorkan gambaran yang mempertegas urgensi itu. Saat ini terdapat 159 peta wilayah adat yang telah diregistrasi di Sumatera Utara, tersebar di 14 Kabupaten/Kota. Namun pengakuan resmi masih jauh dari harapan. Roganda juga mengingatkan ada 25 Undang-Undang dan tujuh Kementerian yang selama ini mengatur Masyarakat Adat secara sektoral dan tumpang tindih. "Kita lebih paham siapa diri kita dibandingkan orang lain. Karena itu identifikasi subjek dan objek wilayah adat seharusnya diserahkan kepada Masyarakat Adat sendiri," tuturnya.

Direktur KSPPM Rocky Pasaribu menambahkan satu hal yang perlu menjadi prinsip dasar dalam penyusunan RUU: negara tidak perlu menciptakan Masyarakat Adat, karena mereka sudah ada jauh sebelum NKRI berdiri. "Negara cukup memberikan pengakuan," katanya.



Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung sedang berbicara dalam pertemuan dengan kalangan akademisi, gereja, tokoh adat dan organisasi masyarakat sipil di Tano Batak.

Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.



Kepala Daerah Berpihak

Gelombang dukungan tidak hanya datang dari komunitas adat dan masyarakat sipil. Para kepala daerah yang selama ini kerap terjebak di antara kepentingan investasi dan kewajiban melindungi warga kini secara terbuka menyatakan posisi mereka.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menegaskan dukungannya dengan gamblang. "Kami mendukung dan mendorong penuh agar regulasi RUU Masyarakat Adat ini segera disahkan menjadi Undang-Undang. Ini penting demi memberi kepastian hukum bagi Masyarakat Adat di Indonesia, khususnya di kawasan Danau Toba," katanya.

Sementara Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu menyebut regulasi yang ada selama ini tidak cukup menjawab persoalan di lapangan. "Hak ulayat dan identitas Masyarakat Adat perlu dilindungi dengan Undang-Undang Masyarakat Adat," tegasnya.

Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal AMAN Periode 2007-2012 dan 2012-2017, membaca perubahan sikap para kepala daerah ini sebagai pertanda penting. Menurutnya, pemerintah daerah kini semakin merasakan sendiri dampak konflik agraria yang berkepanjangan. "Kehadiran UU Masyarakat Adat ini merupakan solusi bagi para Kepala Daerah untuk memperlancar pembangunan dan kedamaian di daerahnya," kata Abdon.

Wakil Ketua Baleg Martin Manurung mengakui akar masalahnya. "Selama ini Pemerintah Daerah sering kesulitan mengambil keputusan karena dasar hukumnya belum kuat. Akibatnya, konflik berlangsung berlarut-larut. Semua ini harus diakhiri dengan UU Masyarakat Adat," ujarnya.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menegaskan Pemerintah Kabupaten Samosir mendukung penuh percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat demi menghadirkan kepastian hukum bagi Masyarakat Adat di kawasan Danau Toba.
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.





Janji Republik yang Sudah 81 Tahun Belum Lunas

RUU Masyarakat Adat telah melewati terlalu banyak janji yang tidak ditepati. Namun perkembangan pada April–Mei 2026 memberi sinyal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya: DPR bergerak ke lapangan, kepala daerah menyatakan posisi secara terbuka, komunitas adat hadir di parlemen dengan data dan kesaksian.

Anggota Baleg I Nyoman Parta menangkap semangat itu dengan tepat. "Jika Baleg DPR RI bisa mewujudkan Undang-Undang ini bukan sekedar persoalan legasi dari kita semua di sini. Tapi ini memenuhi, menunaikan janji Republik yang sudah 81 tahun ini. Janji para leluhur pendiri republik ini," katanya.

Satu hal yang jelas: Masyarakat Adat tidak lagi hanya menunggu. Mereka hadir di parlemen, menyambut kunjungan Baleg dengan data dan kesaksian, terus mendaftarkan wilayah adat, membangun lembaga ekonominya sendiri. RUU Masyarakat Adat boleh saja tertahan hampir dua dekade, tetapi gerakan yang menuntutnya tidak pernah berhenti.

Utusan dari AMAN Nusa Tenggara Barat menyerahkan dokumen Daftar Inventaris Masalah kepada Baleg DPR RI saat pertemuan di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat.
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.





Masyarakat Adat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Dari Instrumen Hukum Internasional sampai dengan Urgensi Pengakuan Hukum Nasional

Oleh: **Hikmawan Pasalo**,
Manager Riset
Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara (AMAN)



Masyarakat Adat melakukan aksi menuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.

"Masyarakat adat berperan menjaga 80 persen ekosistem terbaik dunia, dan ini akan hancur ketika tidak ada pengakuan dan perlindungan."

Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal AMAN, RDPU dengan Badan Legislasi DPR RI, 1 April 2026.

Petrus, salah seorang Masyarakat Adat di wilayah Toraja yang mungkin tidak pernah membaca satu pun pasal dari konstitusi negara, mendengar kabar bahwa hutan, sungai, kebun, sawah, yang dijaga dan dikelola secara turun-temurun oleh nenek moyangnya selama ratusan tahun ternyata bisa kapan saja digusur dan dirampas hanya dengan selembar surat izin dari ibu kota Jakarta. Di ribuan Wilayah Adat lain yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, hal serupa juga dapat terjadi di hadapan kebijakan sentralistik pemerintahan negara yang melanggar Hak-Hak Kolektif Masyarakat Adat. Menuju 81 tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, negara belum juga melahirkan satu undang-undang khusus yang mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat.



Kekhawatiran akan masifnya pelanggaran terhadap hak-hak Masyarakat Adat itu, selain dirasakan langsung oleh Masyarakat Adat sendiri, juga menjadi kekhawatiran berbagai elemen masyarakat sipil dalam negeri, dan dikecam oleh dunia internasional. Pada 4 November 2025, para ahli HAM independen PBB (*The Special Procedures of the Human Rights Council*) mengeluarkan pernyataan resmi dari Jenewa yang langsung ditujukan kepada pemerintah Indonesia: *"Indonesia must recognise Indigenous Peoples and consider them partners for national development"* (UN Human Rights, 4/11/25). PBB merekomendasikan penghentian kekerasan terhadap hak asasi Masyarakat Adat dan meminta pembangunan yang dilakukan pemerintah selalu menghormati, berkeadilan, dan melibatkan Masyarakat Adat dengan mengakui Hak Kolektif mereka – yang menurut PBB sampai saat ini diabaikan.

Krisis keadilan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat merupakan sebuah tuntutan yang berakar jauh ke belakang, ke dalam sejarah panjang perjuangan umat manusia untuk mengakui bahwa hak adalah milik semua, tanpa kecuali – termasuk Hak Kolektif Masyarakat Adat.

Sejarah Lahirnya UDHR dan Jaminan HAM Universal

Untuk memahami mengapa perlindungan Masyarakat Adat adalah soal Hak Asasi Manusia, kita perlu kembali ke Paris, 10 Desember 1948. Di atas reruntuhan Perang Dunia II, 58 negara anggota PBB berkumpul dan mengesahkan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) – di Indonesia dikenal sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Dalam 30 pasal yang ringkas namun monumental, UDHR/DUHAM menyatakan hal yang sederhana namun revolusioner: semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak; tanpa pengecualian atau syarat apa pun. HAM ditegaskan bersifat inherent (melekat) pada diri manusia – bukan karena pemberian negara, melainkan karena ia adalah manusia. Negara hanya berkewajiban mengakui dan melindunginya.



Suara Masyarakat Adat terus disuarakan menolak kebijakan mengabaikan hak kolektif serta persetujuan mereka atas wilayah adat.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



Namun ada yang absen dari UDHR/DUHAM 1948: tidak ada satu pun pasal yang secara khusus berbicara tentang hak-hak kolektif, tidak ada pengakuan bahwa suatu komunitas yang hidup di atas tanah leluhurnya secara turun-temurun memiliki hak tersendiri yang tak dapat direduksi menjadi kumpulan hak individual semata. Celah ini baru mulai diperbaiki 6 dekade kemudian, melalui UNDRIP 2007.

Dari UDHR/DUHAM, PBB kemudian melahirkan dua kovenan besar di tahun 1966: ICCPR yang mengatur hak sipil dan politik (diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005), dan ICESCR yang mengatur hak ekonomi, sosial, dan budaya (diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005). DUHAM juga menegaskan prinsip *indivisibility* (tak terbagi) – bahwa HAM harus dipenuhi secara simultan, tidak boleh dipilah-pilah. Pemahaman inilah yang kelak menjadi landasan mengapa hak Masyarakat Adat, yang mencakup hak atas tanah, identitas budaya, dan partisipasi, harus diperlakukan sebagai satu kesatuan.

Siapa Masyarakat Adat?

Jauh sebelum konsep negara kerajaan atau kesultanan dikenal, bahkan jauh sebelum pengaruh kolonial masuk ke Nusantara, hampir di seluruh pelosok kepulauan Indonesia saat ini telah hidup kesatuan-kesatuan sosial-politik yang berdaulat, yang secara otonom mengelola sumber daya alam di wilayah ekosistemnya masing-masing melalui hukum adat dan sistem kelembagaan sendiri.

Sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal usul yang diwariskan leluhurnya ini secara mendunia dikenal sebagai *Indigenous Peoples*, dan di Indonesia dikenal sebagai Masyarakat Adat – satuan komunitas terkecil yang mampu mengurus dirinya sendiri, bukan hasil proses "menaklukkan-ditaklukkan" sebagaimana pembentukan kerajaan atau negara. Pada umumnya, Masyarakat Adat memiliki wilayah hidup tertentu, struktur kelembagaan adat yang khas, pranata hukum adat, serta sistem pengetahuan dan identitas budaya yang unik.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendefinisikan Masyarakat Adat sebagai "kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri."



Masyarakat Adat Poco Leok melakukan Aksi di PTUN Kupang, menolak Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Poco Leok.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



Momen bersejarah sidang PBB 13 September 2007 yang melahirkan UNDRIP.

Sumber Foto: culturalsurvival.org

Jalan Panjang Menuju UNDRIP

Saat PBB membangun arsitektur HAM di atas kertas tahun 1948, di lapangan jutaan jiwa Masyarakat Adat di seluruh dunia terus mengalami pengusiran, perampasan tanah, dan pemusnahan budaya yang terorganisir oleh kebijakan negara. Pada awal 1980-an, peneliti PBB José R. Martínez Cobo menerbitkan laporan *Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Population* (1982) yang memaparkan secara rinci diskriminasi sistematis itu, memantik dibentuknya *Working Group on Indigenous Populations* (WGIP) di bawah Sub-Komisi HAM PBB pada tahun yang sama, guna merancang instrumen internasional khusus untuk melindungi hak-hak Masyarakat Adat.

Setelah 24 tahun bekerja melewati empat Sekretaris Jenderal PBB dan pembahasan panjang tentang hak menentukan nasib sendiri, tepat pada 13 September 2007 Majelis Umum PBB akhirnya mengadopsi *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP).

Pemungutan suara mencatat sejarah: 143 negara mendukung, 4 menolak (Australia, Kanada, Amerika Serikat, Selandia Baru), dan 11 abstain. Indonesia termasuk dalam 143 negara yang mendukung. Keempat negara penolak kemudian secara berangsur mengubah sikap mereka sejak 2009 hingga 2016, Kanada sebagai negara terakhir yang mencabut status penolakannya. PBB menggambarkan UNDRIP sebagai "standar penting untuk perlakuan terhadap Masyarakat Adat yang niscaya akan menjadi alat signifikan untuk menghapuskan pelanggaran hak asasi manusia terhadap 370 juta Masyarakat Adat di dunia".



UNDRIP: Arsitektur Hak Kolektif Masyarakat Adat

UNDRIP 2007 melengkapi instrumen HAM internasional yang sebelumnya luput menangkap realitas bahwa terdapat satuan-satuan komunitas Masyarakat Adat yang hidup komunal, memiliki kohesi sosial kuat, dan menjaga ekosistem secara turun-temurun – hak kolektif yang kemudian harus diakui dan dilindungi oleh negara-negara dunia. UNDRIP mengisi celah besar dalam sistem HAM internasional sebelumnya: bahwa pengakuan Hak Asasi tidak hanya bersifat individual, melainkan juga kolektif.

Terdapat empat pilar utama UNDRIP 2007.

Pertama, Hak atas Tanah, Wilayah, dan Sumber Daya (Pasal 25-28) – mengakui hak Masyarakat Adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, tempati, atau gunakan, sebagai hak milik penuh yang lahir dari hubungan historis turun-temurun. **Kedua**, Hak atas Budaya, Spiritualitas, dan Hukum Adat (Pasal 34) – mengakui hak Masyarakat Adat mempertahankan dan mengembangkan struktur institusional, praktik, dan hukum adatnya sendiri.

Ketiga, Free, Prior and Informed Consent (FPIC) (Pasal 32) – mewajibkan negara mendapatkan persetujuan yang bebas dari paksaan, didahulukan sebelum proyek dimulai, dan diinformasikan secara lengkap dalam bahasa yang dipahami Masyarakat Adat, sebelum menyetujui proyek yang berdampak pada tanah dan wilayah adat mereka. **Keempat**, Hak Menentukan Nasib Sendiri (Self-Determination) (Pasal 3) – bukan dimaksudkan sebagai hak memisahkan diri dari negara, melainkan hak mengelola urusan lokal dan internal melalui sistem hukum dan tradisi sendiri, termasuk hak kolektif atas tanah dan sumber daya di wilayah adatnya, hak melindungi bahasa dan budaya sendiri, serta hak menentukan persetujuan atau penolakan atas pihak luar yang hendak menggunakan tanah Masyarakat Adat.

Resolusi Majelis Umum PBB melalui UNDRIP memiliki kekuatan normatif yang signifikan sebagai standar interpretasi dan dasar tanggung jawab moral negara-negara dunia terhadap komitmen hak asasi manusia untuk melakukan domestikasi norma serta mentransformasikannya ke dalam bentuk hukum nasional negara.



"Warga Adat Bukan Penjahat" tuntutan penghentian kriminalisasi menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan hak dan wilayah adat.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



Tiga Negeri di Seram Utara Tolak Penetapan Tapal Batas Taman Nasional Manusela

Kontributor : **Yosis Sentris Lilihata,**
Jurnalis Masyarakat Adat di Maluku

Tiga komunitas Masyarakat Adat di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku yakni Negeri Manusela, Negeri Maraina, dan Negeri Hatuolo secara berturut-turut menyatakan penolakan terhadap penetapan dan perubahan tapal batas Taman Nasional Manusela yang dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Mereka menuntut agar seluruh patok dan titik koordinat yang telah dipasang secara sepihak di dalam wilayah adat segera dicabut, dan tapal batas dikembalikan ke batas awal.

Penolakan ini bukan tanpa alasan. Masyarakat Adat dari ketiga negeri tersebut menegaskan bahwa proses penetapan tapal batas dilakukan tanpa musyawarah, tanpa sosialisasi, dan tanpa melibatkan mereka sebagai pemilik hak ulayat yang telah mendiami dan mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun, jauh sebelum Taman Nasional Manusela maupun negara ini berdiri. Kebijakan yang tidak menghormati prinsip *Free Prior and Informed Consent* (FPIC) ini dinilai cacat prosedural dan mengancam ruang hidup Masyarakat Adat.





Manusela: Tolak Titik Koordinat 136

Penolakan pertama disuarakan oleh ratusan Masyarakat Adat Negeri Manusela pada 25 Mei 2026. Mereka menggelar aksi menolak pemasangan tapal batas pada titik koordinat 136 yang dinilai mengancam ruang kelola dan wilayah adat mereka. Titik koordinat tersebut dipasang ulang pada 15 November 2025, tanpa musyawarah dan tanpa melibatkan Masyarakat Adat yang telah bermukim di kawasan itu secara turun-temurun.

Roulands Maloy dari perwakilan Masyarakat Adat meminta pemasangan tapal batas tersebut segera dicabut. Ia menyatakan kekecewaan mendalam atas titik koordinat yang terus dimajukan tanpa penjelasan dari pihak BPKH.

"Kami kecewa, cabut segera tapal batas itu," tegasnya.

Tetua Adat Manusela, Danci Maloy, menyesalkan pemasangan titik koordinat yang dilakukan tanpa sosialisasi dari pihak Balai Taman Nasional.

Menurutnya, patok itu dipasang di atas tanah adat di dalam kawasan dusun Sagu yang selama ini menjadi tempat berburu dan berkebun bagi Masyarakat Adat, tepat di dekat kampung adat Manusela.

"Kami hadir memiliki tanah ini sebelum ada Balai Taman Nasional Manusela," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Balai Taman Nasional Manusela terkait pemajuan titik koordinat 136 di wilayah adat Manusela.



**KAMI MASYARAKAT ADAT NEGERI MANUSELA
MEMINTA KEPADA PIHAK
TAMAN NASIONAL MANUSELA UNTUK
MENINJAU KEMBALI TITIK KOORDINAT 136
NEGERI MANUSELA KECAMATAN SERAM UTARA**

PAL BATAS MAJU MUNDUR
KURANGNYA SOSIALISASI BALAI TAMAN NASIONAL
KOMPENSASI
KERINGANAN HUKUM
SAHKAN RUU MASYARAKAT ADAT

Masyarakat Adat Negeri Manusela melakukan aksi damai menuntut pencabutan titik koordinat baru & meminta mengembalikan tapal batas Taman Nasional Manusela ke batas awal yang diakui masyarakat.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



Laki-laki, perempuan, & tetua adat Negeri Maraina lakukan aksi penolakan tapal batas baru Taman Nasional Manusela, pelestarian hutan tidak boleh abaikan hak Masyarakat Adat atas wilayah adat mereka.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



Maraina: Ikat Merah sebagai Simbol Ketegasan

Sepekan kemudian, pada 1 Juni 2026, giliran Masyarakat Adat Negeri Maraina menggelar aksi penolakan. Dalam aksi damai ini, mereka mengenakan ikat kain merah di kepala sebagai simbol ketegasan sikap dalam memperjuangkan hak-hak adat. Beragam spanduk dan poster berisi tuntutan pencabutan tapal batas kawasan dipajangkan di pintu masuk negeri Maraina.

Pemuda adat Maraina, Arter Ropen, menerangkan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan Masyarakat Adat yang tidak pernah dilibatkan dalam proses penetapan tapal batas yang memasuki wilayah adat mereka.

"Penetapan tapal batas Taman Nasional Manusela tidak transparan. Masyarakat Adat tidak pernah dilibatkan dalam penentuan titik koordinatnya," kata Arter di sela aksi.

Masyarakat Adat Maraina mengajukan lima tuntutan: mengembalikan batas Taman Nasional Manusela ke batas awal, menolak batas 500 meter dari Negeri Maraina, meminta transparansi terkait batas kawasan, menghentikan aktivitas BTN dan BPKH di tanah adat, serta mendesak pemerintah daerah untuk segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Adat.

Arter menegaskan Masyarakat Adat tidak menolak pelestarian hutan, namun menuntut hak-hak mereka dihormati dan dilibatkan dalam setiap kebijakan yang menyangkut wilayah adat.

"Kami tidak menolak pelestarian hutan, tapi kami minta hak-hak Masyarakat Adat dihormati dan dilibatkan dalam setiap kebijakan yang menyangkut wilayah adat," tandasnya.



Tarik Batu Kubur: Tradisi Megalitik Masyarakat Adat Sumba yang Merawat Solidaritas & Identitas

Kontributor:
Umbu Ch Nusa Mesa,
Jurnalis Masyarakat Adat
di Sumba, Nusa Tenggara Timur

*Ratusan warga Masyarakat Adat Bodomaroto bergotong royong menarik batu kubur sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada leluhur.
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.*



Ratusan orang berkumpul di Desa Kalimbukuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Mereka datang membawa tali tambang dan perlengkapan adat, bersiap untuk melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan bersama-sama: menarik batu berukuran besar dari bawah kampung menuju atas, sebuah perjalanan yang membutuhkan waktu berjam-jam, tenaga ratusan tangan, dan kekuatan ikatan sosial yang tidak bisa diukur dengan cara apapun selain kehadiran.

Itulah tradisi tarik batu kubur Masyarakat Adat Bodomaroto, sebuah prosesi adat megalitik yang telah diwariskan turun-temurun sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada leluhur. Batu besar yang ditarik itu kelak akan menjadi nisan makam adat yang bukan sekadar tempat peristirahatan, melainkan penanda keberadaan, identitas, dan martabat sebuah keluarga di hadapan komunitas adatnya.



Sumba dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tradisi budaya megalitik yang masih hidup dan dipraktikkan hingga hari ini. Kuburan batu atau kubur batu adalah bagian dari sistem kepercayaan Marapu, kepercayaan leluhur Masyarakat Adat Sumba yang menempatkan leluhur sebagai penjaga kehidupan dan penghubung antara dunia yang hidup dengan dunia yang telah pergi. Dalam kerangka ini, prosesi tarik batu bukan sekadar pekerjaan fisik, melainkan ritual sakral yang mempertegas hubungan antara yang hidup dan leluhur, serta memperkuat ikatan sosial antarwarga dalam satu komunitas adat.

Simbol Solidaritas

Tetua adat Bodomaroto, Ama Lali, menegaskan bahwa tradisi tarik batu adalah bentuk penghormatan terakhir kepada leluhur sekaligus simbol persatuan Masyarakat Adat Sumba. Dalam prosesi ini, setiap keluarga mengambil bagian sebagai tanda dukungan kepada keluarga yang menyelenggarakan upacara adat.

"Adat ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama-sama," kata Ama Lali usai memimpin ritual tarik batu pada pertengahan Mei 2026.

Musyawarah dan persiapan adat berlangsung hingga malam hari sebagai bagian dari rangkaian prosesi tarik batu kubur.

Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.





Proses pemindahan batu tidak dilakukan sembarangan. Ama Natan, salah satu anggota keluarga yang turut menarik batu, menjelaskan bahwa sebelum prosesi dimulai, keluarga besar terlebih dahulu mengadakan musyawarah adat untuk menentukan hari baik pelaksanaan, karena Masyarakat Adat Sumba masih memegang kuat kepercayaan leluhur dan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Saat prosesi berlangsung, seluruh komunitas bergerak dalam perannya masing-masing. Perempuan menyiapkan makanan dan minuman; laki-laki menarik batu menuju lokasi makam adat. Iringan gong tradisional mengiringi langkah demi langkah perjalanan batu itu. Tidak sedikit warga dari kampung lain ikut membantu, meski tidak memiliki hubungan keluarga langsung dengan penyelenggara upacara.

"Semangat gotong royong seperti ini mulai jarang ditemukan di tengah kehidupan modern," kata Natan.

Bagi Masyarakat Adat Sumba, makam batu memiliki makna yang dalam. Semakin besar batu yang digunakan, semakin tinggi penghormatan yang diberikan kepada leluhur atau tokoh adat yang dimakamkan. Tradisi ini juga telah menarik perhatian peneliti budaya dan wisatawan dari dalam dan luar negeri yang datang untuk menyaksikan langsung salah satu warisan budaya megalitik yang masih hidup di Nusantara.



Tetua adat memimpin prosesi tarik batu kubur yang menjadi simbol persatuan dan penghormatan kepada leluhur Masyarakat Adat Sumba.

Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.



Identitas Budaya yang Harus Dijaga

Ketua Pelaksana Harian AMAN Wilayah Sumba, Debora Rambu Kasuatu, menegaskan bahwa tradisi tarik batu adalah bagian penting dari identitas budaya Masyarakat Adat Sumba, bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan bagian dari kehidupan sosial yang terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Bagi AMAN, keberlangsungan tradisi seperti tarik batu adalah bagian tidak terpisahkan dari perjuangan pengakuan hak-hak Masyarakat Adat secara lebih luas. Tradisi ini hanya bisa bertahan jika wilayah adat tempat ia dipraktikkan – tanah, kampung, dan ruang hidup Masyarakat Adat Sumba – turut diakui dan dilindungi oleh negara. Itulah mengapa pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Masyarakat Adat bukan hanya soal regulasi, melainkan soal kelangsungan hidup sebuah kebudayaan.

"Tradisi ini harus tetap lestari karena menjadi bagian penting dari identitas budaya Sumba," kata Debora.



Dengan tenaga puluhan orang, batu kubur perlahan dipindahkan menuju lokasi makam adat sebagai penghormatan kepada leluhur.
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.



Pemuda Adat Papua Konsolidasi di Wilayah Adat Moi Kelim, Perkuat Barisan Hadapi Ancaman terhadap Wilayah Adat

Kontributor :
Oktovianus Amkark,
Anggota BPAN Moi Salkma.



*Peserta Konsolidasi BPAN Region Papua berfoto bersama di Wilayah Adat Moi Kelim, Sorong, Papua Barat Daya, 23 Mei 2026.
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.*

Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Region Papua berhasil melaksanakan Konsolidasi Pemuda Adat selama tiga hari, 21–23 Mei 2026, di wilayah adat Moi Kelim, Sorong. Kegiatan ini dihadiri anggota BPAN dan Pemuda Adat se-Region Papua, terutama dari Suku Moi, dengan representasi kuat dari empat sub suku besarnya: Moi Kelim, Moi Maya, Moi Sigin, dan Moi Salkma.

BPAN merupakan organisasi kepemudaan Masyarakat Adat di bawah naungan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang berfungsi sebagai ruang pembentukan kader-kader muda penggerak gerakan Masyarakat Adat di seluruh Nusantara. Di Region Papua, kehadiran BPAN menjadi semakin strategis di tengah meningkatnya tekanan terhadap wilayah adat — mulai dari ekspansi investasi, perambahan hutan, hingga kriminalisasi warga yang mempertahankan tanah leluhurnya.

Konsolidasi ini menjadi ruang bersama bagi Pemuda Adat sebagai generasi penerus untuk mempererat solidaritas, memperkuat persaudaraan lintas suku, dan membangun kesadaran kolektif dalam menjaga tanah, hutan, budaya, dan ruang hidup Masyarakat Adat di Tanah Papua.

Rangkaian kegiatan dibuka dengan ritual adat yang dipimpin langsung oleh tetua adat Sub Suku Moi Kelim — sebuah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur sebelum agenda konsolidasi secara resmi dimulai. Setelah itu, PJ Ketua Umum BPAN, Hero Aprila, membuka konsolidasi secara resmi.



Dalam sambutannya, Hero menegaskan bahwa BPAN hadir sebagai wadah sekaligus lokomotif bagi Pemuda Adat untuk kembali mengenal kampung halamannya, menjaga wilayah adat, dan mewarisi nilai-nilai budaya leluhur. Ia menekankan bahwa Pemuda Adat harus mampu mengelola sumber daya alam secara mandiri agar Masyarakat Adat tidak terus bergantung pada pihak luar maupun negara.

"BPAN adalah rumah bersama bagi Pemuda Adat. Di dalam wadah ini kita belajar bersama, berjuang bersama, dan membangun persaudaraan tanpa melihat perbedaan. Kita berada di sini untuk menjaga tanah, hutan, sungai, rawa, mata air, beserta seluruh keanekaragaman hayati yang berada di wilayah adat — demi masa depan Masyarakat Adat Nusantara yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat," ujar Hero.

Selain memperkuat konsolidasi gerakan, forum ini juga membahas sejumlah agenda organisasi yang penting: pengusulan perubahan Statuta, perubahan Garis-Garis Program dan Kebijakan (GPBK), perubahan Manifesto organisasi, serta persiapan pemilihan kepemimpinan BPAN berikutnya — yang akan terdiri dari satu ketua laki-laki dan satu ketua perempuan, mencerminkan komitmen BPAN terhadap kepemimpinan berkeadilan gender.

Konsolidasi ini juga dihadiri perwakilan Dewan AMAN Daerah (DAMANDA), Serli Mobalen, serta dari Tim Advokasi AMAN, Ambrosius Klagilit. Dalam arahnya, Serli mendorong Pemuda Adat untuk terus menjadi generasi yang berani memperjuangkan hak-hak Masyarakat Adat secara bermartabat, kritis, dan bertanggung jawab terhadap masa depan tanah adatnya.

*Tetua adat memimpin ritual pembukaan Konsolidasi BPAN Region Papua sebelum rangkaian kegiatan organisasi dimulai.
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.*





Hero juga mengingatkan pentingnya setiap wilayah adat untuk terus memantau persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah pengorganisasian masing-masing – dari perampasan wilayah adat dan kerusakan hutan, hingga berbagai bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat. Menurutnya, semua persoalan itu harus dibawa dan diperjuangkan bersama di dalam BPAN.

Konsolidasi BPAN Region Papua ini berlangsung di tengah momentum penting advokasi RUU Masyarakat Adat di tingkat nasional. Setelah lebih dari 16 tahun mandek di DPR, RUU Masyarakat Adat kembali masuk Prolegnas Prioritas 2026, kali ini dengan sejumlah perkembangan baru. Baleg DPR mengubah nomenklatur RUU dari "Masyarakat Hukum Adat" menjadi "Masyarakat Adat", sebuah perubahan yang disambut positif oleh masyarakat sipil meski substansinya tetap harus dikawal.

Bagi Pemuda Adat di Papua, pengesahan RUU Masyarakat Adat bukan sekadar agenda legislasi, melainkan kebutuhan mendesak yang terasa langsung di wilayah adat mereka. Tanpa kepastian hukum, ancaman terhadap tanah dan hutan adat Suku Moi dan komunitas Masyarakat Adat lainnya di Papua terus berlangsung tanpa hambatan. Konsolidasi BPAN Region Papua menegaskan bahwa perjuangan di akar rumput dan desakan di tingkat nasional adalah dua sisi dari gerakan yang sama, gerakan Masyarakat Adat yang menuntut pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan haknya oleh negara.

Konsolidasi BPAN Region Papua ditutup pada 23 Mei 2026 dengan pembacaan Sumpah Janji Pemuda Adat Nusantara – simbol komitmen bersama untuk menjaga persatuan, memperjuangkan hak-hak Masyarakat Adat, serta merawat tanah dan budaya Papua bagi generasi mendatang. Melalui konsolidasi ini, BPAN Region Papua berharap lahir kader-kader Pemuda Adat yang sadar identitas, kuat dalam persaudaraan, dan siap menjadi pelindung tanah dan hutan adat di tengah berbagai tantangan zaman.



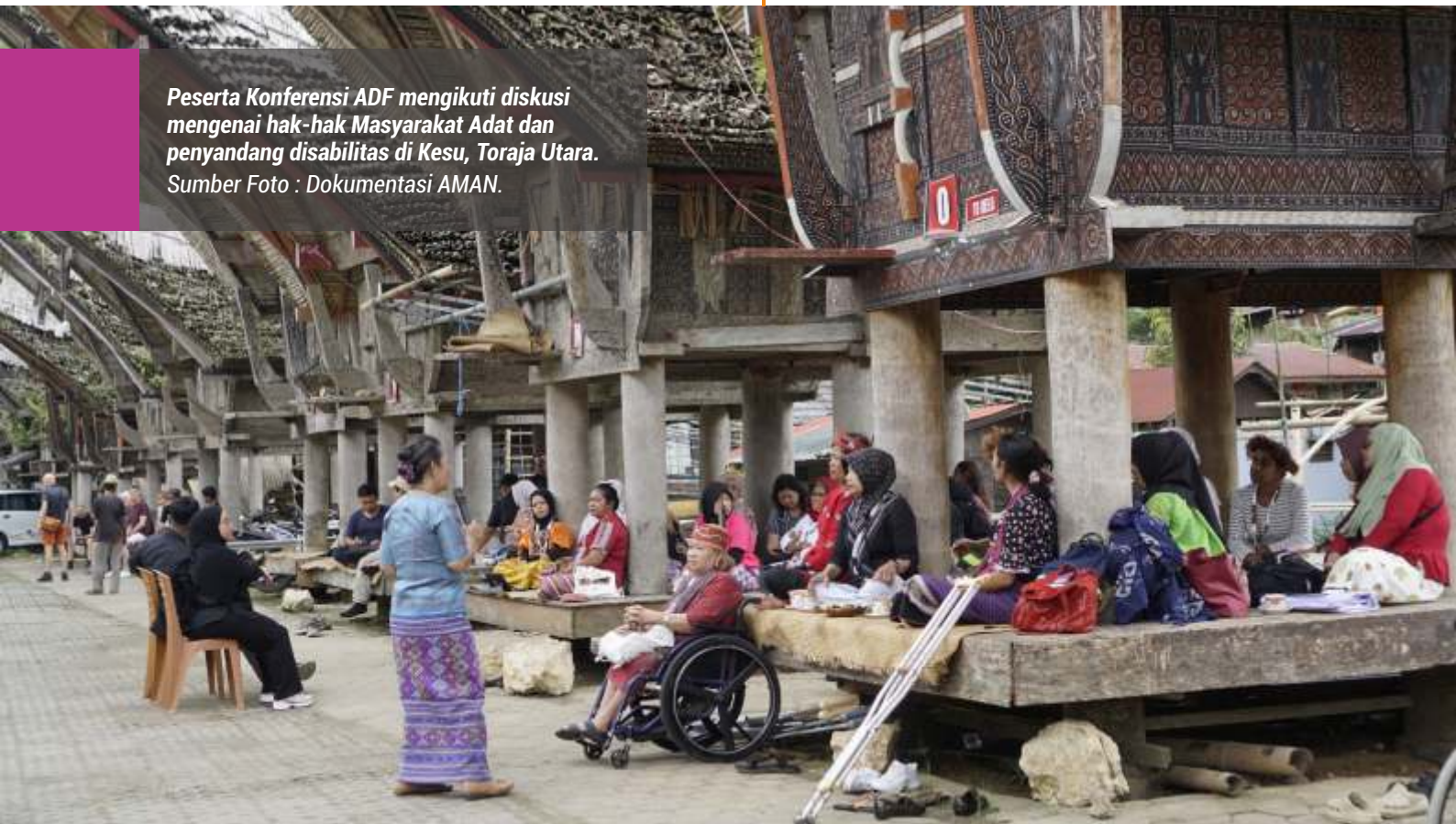
*PJ Ketua Umum BPAN Hero Aprila memberikan arahan kepada peserta Konsolidasi BPAN Region Papua di Wilayah Adat Moi Kelim, Sorong.
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.*



Perempuan Adat Penyandang Disabilitas Desak Pengesahan RUU Masyarakat Adat di Konferensi ADF Toraja

Kontributor :
Arnol Prima Burara,
Jurnalis Masyarakat Adat
di Tana Toraja, Sulawesi Selatan

Peserta Konferensi ADF mengikuti diskusi mengenai hak-hak Masyarakat Adat dan penyandang disabilitas di Kesu, Toraja Utara. Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.



Perempuan Adat penyandang disabilitas menuntut Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat segera disahkan. Bagi mereka, undang-undang ini bukan sekadar regulasi, melainkan dasar hukum yang selama ini absen, sementara diskriminasi dan kerentanan berlapis terus mereka tanggung setiap harinya.

Tuntutan ini menjadi salah satu poin deklarasi yang dihasilkan dari Konferensi ASEAN Disability Forum (ADF) yang berlangsung di wilayah adat Kesu', Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, 8–11 Juni 2026. Deklarasi tersebut menegaskan pentingnya pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat – termasuk hak Perempuan Adat penyandang disabilitas yang kerap luput dari perhatian negara.



Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan, Maria Un, menyebut Perempuan Adat penyandang disabilitas menghadapi risiko yang jauh lebih besar dibanding kelompok lain. Mereka berada di persimpangan tiga lapis kerentanan sekaligus: sebagai perempuan, sebagai penyandang disabilitas, dan sebagai anggota Masyarakat Adat yang hingga kini belum mendapat perlindungan hukum memadai.

"Saat ini sudah ada regulasi yang mengatur perlindungan perempuan dan penyandang disabilitas, tapi payung hukum yang secara khusus mengakui dan melindungi Masyarakat Adat belum ada. Kami mendesak agar RUU Masyarakat Adat segera disahkan menjadi undang-undang," kata Maria usai konferensi, Kamis (11/6).

Konferensi ADF dihadiri perwakilan komunitas Masyarakat Adat dari berbagai daerah di Indonesia. Melalui forum ini, para peserta menegaskan bahwa pengesahan RUU Masyarakat Adat merupakan langkah mendasar untuk memastikan tidak ada lagi kelompok yang tertinggal, terpinggirkan, atau kehilangan hak atas identitas, wilayah, dan ruang hidupnya.



Peserta Konferensi ADF menyimak pembahasan mengenai perlindungan hak-hak Masyarakat Adat dan penyandang disabilitas.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN



Belum Ada Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat

RUU Masyarakat Adat sendiri telah lama menjadi tuntutan gerakan Masyarakat Adat di Indonesia. Rancangan ini pertama kali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada 2009, namun hingga pertengahan 2026 belum juga disahkan, meski ancaman terhadap wilayah adat, ruang hidup, dan hak-hak dasar Masyarakat Adat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Ketua Pelaksana Harian AMAN Wilayah Sulawesi Selatan, Tendri Itti, menegaskan bahwa pengesahan RUU Masyarakat Adat bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan sebuah keharusan. Tanpa kepastian hukum, perampasan wilayah adat, penggusuran paksa, perusakan lingkungan hidup, hingga kriminalisasi warga yang mempertahankan tanah dan hutannya terus berulang tanpa ada yang bisa menghentikannya.

"Situasi ini terus berulang karena belum ada perlindungan hukum yang jelas dan mengikat bagi Masyarakat Adat. Semua ini harus dihentikan, pengesahan RUU Masyarakat Adat harus menjadi prioritas negara," tegas Tendri.



Perempuan Adat penyandang disabilitas dari berbagai daerah mengikuti Konferensi ASEAN Disability Forum (ADF) di Wilayah Adat Kesu, Toraja Utara, sebagai ruang bersama untuk menyuarakan pengakuan, perlindungan bagi Masyarakat Adat terlebih Masyarakat Adat dengan disabilitas.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



Delegasi AMAN Warnai London Climate Action Week 2026

London - Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi bersama rombongan delegasi lainnya menghadiri London Climate Action Week (LCAW) yang berlangsung 20-28 Juni 2026 di London, Inggris. Kehadiran delegasi AMAN di acara yang berlangsung selama sepekan ini untuk memastikan dunia sadar bahwa pengakuan terhadap Masyarakat Adat adalah investasi terbaik untuk menyelamatkan bumi.

Kontributor:

Ridhoino Kristo Sebastianus Melano,
Jurnalisme Masyarakat Adat di Kalimantan Barat;
Abdi Akbar, Delegasi AMAN di LCAW 2026;
Rainny Situmorang, Delegasi AMAN di LCAW 2026.

Rukka menegaskan kehadiran AMAN dalam LCAW 2026 sangat penting untuk bisa mewarnai kebijakan-kebijakan yang sedang dibicarakan dan diputuskan.

"AMAN perlu hadir di acara ini supaya orang bisa secara langsung mendengar bagaimana AMAN bekerja," kata Rukka di sela pelaksanaan LCAW 2026, Selasa (23/6).



*Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi saat tampil sebagai pembicara utama dalam forum khusus bertajuk "Ekonomi Masyarakat" di hari kelima pertemuan London Climate Action Week (LCAW).
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.*



la menerangkan, hukum dan kelembagaan adat serta pengetahuan tradisional dan gotong royong menjadi modal utama Masyarakat Adat untuk bisa membuat mereka dan bumi bertahan menghadapi krisis iklim. Menurutnya, London Climate Action Week 2026 membicarakan pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Adat sebagai kontribusi besar dalam menyelamatkan bumi dan kemanusiaan. "Hal ini bisa diakui dan disepakati sebagai satu diantara solusi paling penting. Ini juga mendapatkan dukungan langsung dari berbagai pihak," ujarnya.

LCAW sendiri tercatat sebagai festival iklim terbesar di Eropa, diikuti lebih dari 75.000 peserta dengan ratusan acara, pameran, dan pertemuan yang menyoroti kebijakan. Penyelenggaraannya berfokus pada empat pilar: membentuk diplomasi iklim global, mendorong transisi net-zero dan tangguh di tingkat lokal Inggris, menyelaraskan "Klaster Iklim" London, serta mempromosikan keterlibatan seluruh masyarakat dalam isu iklim, dengan program unggulan seputar daya saing energi bersih, pembiayaan iklim, AI dan elektrifikasi, serta sistem pangan.

Ekonomi Masyarakat Adat yang Mandiri dan Berdaulat

Salah satu momen penting datang pada hari kelima LCAW, Kamis (25/6), ketika Rukka tampil sebagai pembicara utama dalam forum khusus bertajuk "Ekonomi Masyarakat" yang dilaksanakan Global Alliance of Territorial Communities (GATC). Di forum ini Rukka menegaskan kemandirian Masyarakat Adat yang sejati tercapai ketika komunitas mampu hidup sejahtera dan bahagia melalui pengelolaan wilayahnya secara bijaksana.

"Kemandirian tercapai jika kita mengelola secara berkelanjutan seluruh kekayaan titipan leluhur. Baik kekayaan material yang berada di bawah, di atas, maupun di permukaan tanah wilayah adat kita, hingga kekayaan immaterial seperti spiritualitas, pengetahuan, seni tradisi, kesusasteraan, ritual, dan kearifan adat kita," kata Rukka dalam paparannya.



Delegasi Masyarakat Adat, mitra internasional, dan Forest Tenure Funders Group (FTFG) berfoto bersama usai dialog strategis tentang pendanaan iklim dalam rangkaian London Climate Action Week 2026.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



"Ekonomi Masyarakat Adat mandiri jika sungai, laut, hutan, dan tanah leluhur menyediakan kebutuhan hidup yang berkecukupan bagi kita, pangan cukup, energi pun cukup! Ekonomi kita mandiri jika kreativitas dan inovasi dalam budaya mampu membahagiakan diri kita sendiri serta orang lain di sekitar kita," jelasnya.

Rukka memaparkan, AMAN telah membentuk 47 Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA) sebagai wadah kemandirian ekonomi Masyarakat Adat – lembaga usaha yang didirikan, dimiliki, dan dikelola secara kolektif oleh komunitas Masyarakat Adat, tersebar di seluruh Nusantara. Salah satunya Gerai Nusantara (GENUS) Coffee & Boutique, rumah bagi produk dan pengetahuan Masyarakat Adat, dengan misi promosi dan pemasaran berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi Masyarakat Adat, pelestarian budaya dan lingkungan, serta inklusivitas dan keberagaman. GENUS menghadirkan produk unggulan mulai dari kain tenun tangan, keranjang tradisional, kopi, dan gula aren, hingga produk-produk inovatif bersentuhan etnik. Tantangan yang dihadapi kini, menurut Rukka, adalah manajemen bisnis berupa literasi keuangan, akses pasar, dan akses keuangan. "AMAN akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas GENUS agar dapat bersaing di pasar lokal maupun internasional untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bagi Masyarakat Adat di Nusantara," pungkasnya.

Gagasan ekonomi berdaulat itu juga tampil di lapangan, lewat kegiatan Bazaar in Hall yang digelar AMAN dalam rangkaian Internasional Asia Indigenous Peoples Summit 2026, bagian dari LCAW. AMAN memanfaatkan momentum ini untuk mempromosikan produk unggulan hasil karya Masyarakat Adat dari sejumlah wilayah di Indonesia sebagai upaya memperkenalkan produk ekonomi Masyarakat Adat yang ramah iklim, sekaligus melestarikan kekayaan budaya Nusantara di panggung dunia. Salah satu komoditas utama yang dipamerkan adalah kain tenun tradisional produksi Kelompok Usaha Masyarakat Adat (KUMA), dengan beragam motif khas dari Tano Batak, Ende, Baduy, dan Sumba – setiap lembar tidak hanya menunjukkan keindahan estetika, tetapi juga mencerminkan keterampilan tradisional serta filosofi mendalam dari masing-masing suku. Selain kain tenun, AMAN turut menghadirkan produk kopi dari komunitas Masyarakat Adat yang diproduksi dengan prinsip keberlanjutan.



AMAN memperkenalkan produk-produk unggulan Masyarakat Adat, mulai dari tenun tradisional hingga kopi, dalam Bazaar Asia Indigenous Peoples Summit 2026 di London untuk memperluas akses pasar internasional.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



Mendesak Akses Pendanaan Iklim Langsung

Rukka menyatakan, melalui partisipasi dalam bazar internasional di London ini, AMAN membuka ruang yang lebih luas bagi Masyarakat Adat untuk memperluas jaringan pasar mereka ke tingkat global. "Kehadiran produk-produk ini diharapkan mampu memperkuat dukungan internasional terhadap model ekonomi Masyarakat Adat yang mandiri, berdaulat, dan berkelanjutan," katanya penuh harap.

Selain forum ekonomi dan bazar, AMAN bersama para pemimpin Masyarakat Adat dunia yang tergabung dalam GATC turut mendesak Forest Tenure Funders Group (FTFG) untuk memberikan akses pendanaan iklim langsung untuk Masyarakat Adat. Desakan ini mencuat dalam dialog hari keempat LCAW, Rabu (24/6), yang fokus membedah urgensi pendanaan iklim yang lebih transparan dan inklusif. Ada tiga poin krusial yang menjadi sorotan: mekanisme penyaluran dana melalui berbagai struktur lembaga yang ada saat ini; arti penting peran lembaga perantara dan dampaknya terhadap efektivitas dana di lapangan; serta akses langsung (Direct Access) pendanaan yang ideal bagi Masyarakat Adat tanpa birokrasi yang berbelit.



Delegasi AMAN dan Global Alliance of Territorial Communities (GATC) berdialog dengan Forest Tenure Funders Group (FTFG) dalam London Climate Action Week 2026.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



Para delegasi yang hadir dalam dialog ini meneguhkan prinsip Masyarakat Adat bukanlah objek, melainkan investor sejati, rekan pelaksana (co-implementer), sekaligus aktor kunci dalam menghadirkan solusi nyata bagi keberlangsungan hutan, seluruh keanekaragaman hayati, serta penyelamatan iklim global. Mereka juga menegaskan bahwa tata kelola, pemantauan, hingga proses evaluasi pendanaan iklim wajib dilakukan secara kolaboratif, langkah yang dinilai menjadi satu-satunya cara untuk memastikan pendanaan tersebut benar-benar sampai ke Masyarakat Adat dan memberikan dampak langsung di wilayah adat.

Pesan Kritis untuk Pemerintah Inggris

Dalam kesempatan yang sama, Rukka menyampaikan apresiasi, sekaligus pesan kritis kepada perwakilan Pemerintah Inggris yang turut hadir dalam pertemuan FTFG tersebut. Ia menyoroti bagaimana pola konsumsi masyarakat di negara-negara maju berdampak langsung pada hilangnya ruang hidup Masyarakat Adat di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Disebutnya, hampir setengah dari produk yang ditemukan di rak-rak supermarket Inggris mengandung minyak sawit, mulai dari cokelat, biskuit, hingga sabun dan pasta gigi.

"Bagi konsumen Inggris, minyak sawit hanyalah bahan lain yang tertera pada label. Namun bagi kami, Masyarakat Adat di Indonesia, itu adalah salah satu pendorong paling nyata dari hancurnya wilayah adat kami," tegas Rukka.

Rukka juga menyinggung rencana regulasi Pemerintah Inggris terkait komoditas yang terkait dengan deforestasi. Menurutnya, aturan tersebut hanya akan efektif jika bertumpu pada dua pilar utama: pertama, regulasi tersebut harus secara eksplisit mengakui dan melindungi hak-hak serta wilayah Masyarakat Adat, yang merupakan salah satu benteng paling efektif di dunia melawan deforestasi; kedua, regulasi harus mengatasi masalah yang lebih mendalam, yaitu pola konsumsi yang tidak berkelanjutan. Ia mengingatkan, melonjaknya permintaan global terhadap komoditas seperti minyak sawit terus memicu hilangnya hutan dan kerusakan ekosistem.

"Kita tidak bisa terus berkonsumsi dengan kecepatan seperti ini tanpa mempertaruhkan masa depan hutan, dan pada akhirnya, kehidupan kita semua, baik yang ada di Inggris maupun di Indonesia," pungkasnya.

Suasana forum khusus Ekonomi Masyarakat yang dilaksanakan oleh Global Alliance of Territorial Communities (GATC) di London. Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.





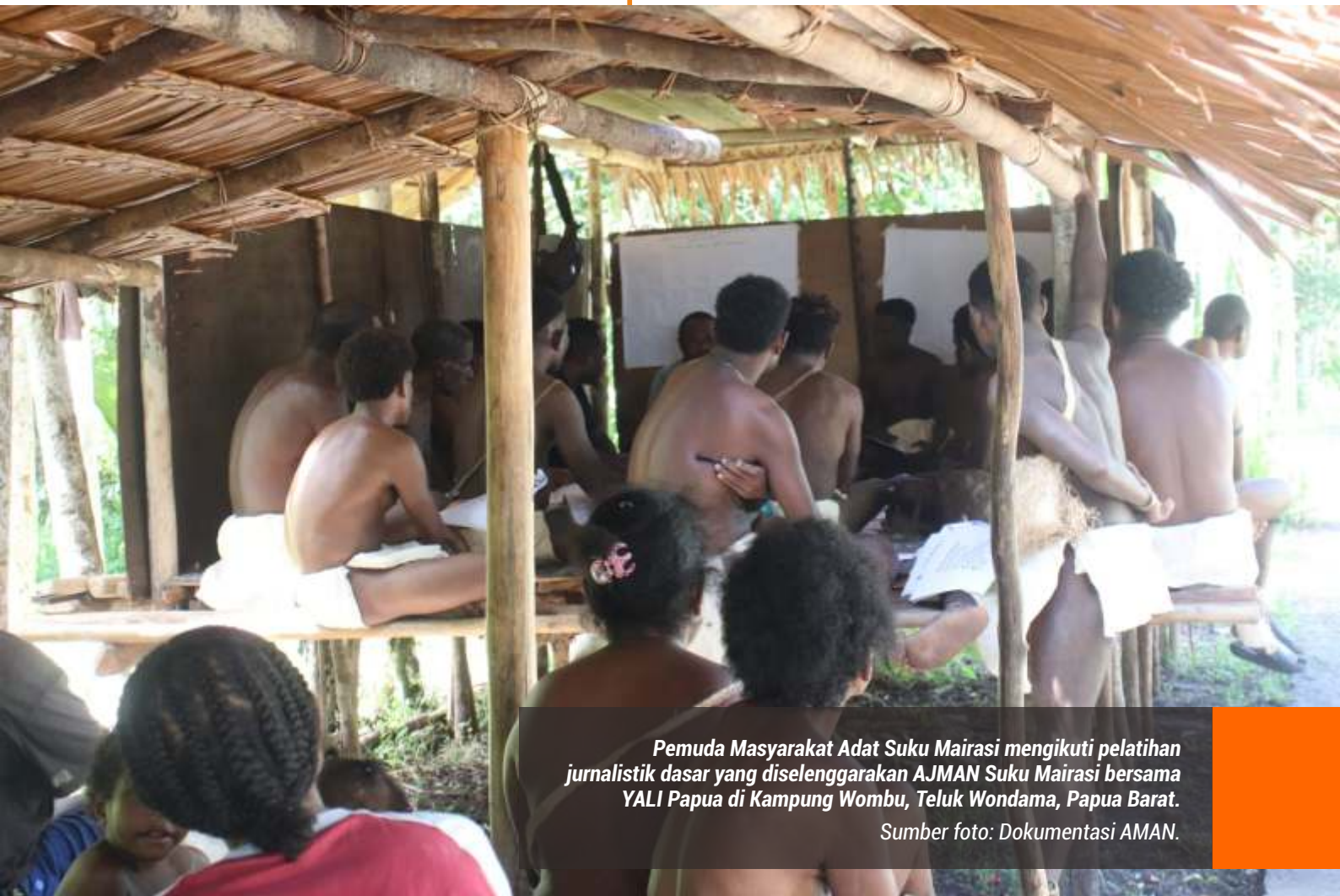
AJMAN Suku Mairasi Melatih Pemuda di Kampung Menjadi Jurnalists Masyarakat Adat

Kontributor : **Nesta Makuba,**
Jurnalists Masyarakat Adat di Papua.

Pengurus Daerah Asosiasi Jurnalists Masyarakat Adat Nusantara (AJMAN) Suku Mairasi melatih 30 orang pemuda adat dari perwakilan beberapa kampung di Kabupaten Teluk Wondama dan Kaimana, Papua Barat, menjadi Jurnalists Masyarakat Adat.

Pelatihan jurnalistik dasar yang berlangsung selama satu hari ini terselenggara atas kerjasama dengan Yayasan Lingkungan Hidup Papua (Yali Papua) di rumah inisiasi Suku Mairasi, Kampung Wombu, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, pada Selasa, 19 Mei 2026.

Dalam pelatihan ini, peserta mendapat materi dasar-dasar jurnalistik dan standar penulisan berita menggunakan rumus 5W+1H, sebagai standar penulisan seorang Jurnalists Masyarakat Adat (JMA). Pelatihan disertai diskusi kelompok dan simulasi menulis berita.



Pemuda Masyarakat Adat Suku Mairasi mengikuti pelatihan jurnalistik dasar yang diselenggarakan AJMAN Suku Mairasi bersama YALI Papua di Kampung Wombu, Teluk Wondama, Papua Barat.

Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Selain menulis berita, peserta juga diajarkan menggunakan kamera untuk mengambil foto sebagai penyerta berita yang akan mereka kirim nantinya saat membuat tulisan.

Petrus, salah seorang peserta dari Suku Mairasi, cukup antusias mengikuti pelatihan jurnalistik dasar ini. Menurutnya, pelatihan ini cukup bermanfaat bagi mereka untuk menuliskan kisah dari kampung.

"Ini sebuah ilmu yang jarang kami dapat di kampung, jadi penting untuk kami menulis sendiri cerita dari kampung," ungkapnya.

Petrus berharap dari pelatihan ini, anak muda di Suku Mairasi termotivasi menjadi penjaga dan penulis kisahnya sendiri, sehingga tidak ada lagi eksploitasi cerita Masyarakat Adat yang disampaikan secara keliru kepada publik.

Pelatihan Jurnalistik Cukup Membantu Pemuda Adat di Kampung

Ketua PD AJMAN Suku Mairasi, Sulis Urio, menerangkan pengetahuan tentang jurnalistik sangat penting, mengingat selama ini Masyarakat Adat Suku Mairasi cukup sering melakukan kampanye penyelamatan wilayah hutan adat dari ekspansi perusahaan kayu yang terus-menerus menguras sumber daya alam yang mereka miliki. Menurutnya, pelatihan ini akan membantu para pemuda adat untuk menuliskan segala kisah dari kampung, di tengah keterbatasan akses informasi yang dialami Masyarakat Adat Suku Mairasi.

"Pelatihan jurnalistik ini cukup membantu kami, apalagi dilakukan usai mengikuti Rakernas AJMAN baru-baru ini. Kegiatan ini akan menjadi penyemangat buat kami," kata Sulis.



Seorang pemateri (kiri) sedang memberikan materi teknik menulis berita kepada orang peserta pelatihan jurnalistik dasar di rumah inisiasi Suku Mairasi.

Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Peserta pelatihan jurnalistik dasar AJMAN Suku Mairasi berfoto bersama usai kegiatan.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN



Diakuinya, selama ini Masyarakat Adat Suku Mairasi mengalami kesulitan untuk menuliskan kisahnya sendiri. Padahal, banyak kisah yang bisa ditulis dari kampung mereka, mengingat luasnya hutan adat Mairasi yang membelah Kabupaten Teluk Wondama dan Kaimana.

"Sebagai pemula, pelatihan ini sangat membantu kami dan rekan-rekan JMA di Suku Mairasi," imbuhnya.

Kesempatan Menjadi Jurnalis Masyarakat Adat

Nesta Makuba dari Badan Koordinasi Region AJMAN Papua mengapresiasi semangat para peserta yang cukup antusias mengikuti pelatihan dasar jurnalistik. Ia mengatakan kegiatan ini menjadi modal bagi para Jurnalis Masyarakat Adat yang baru dilatih untuk menulis berita dari kampungnya.

"Pelatihan jurnalistik ini akan terus kita lakukan di Papua, ini kesempatan bagi para pemuda adat untuk menempa dirinya menjadi Jurnalis Masyarakat Adat," pungkasnya.



Elisabeth Pimpin BPAN 2026-2030, Sekjen AMAN: Amanah dari Leluhur

Oleh: **Muh. Nurji**,
Jurnalis Masyarakat Adat
di Nusa Tenggara Barat.

Jambore Nasional (Jamnas) V Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) menetapkan Elisabeth Simanjuntak sebagai Ketua Umum BPAN periode 2026–2030 pada Kamis, 2 Juli 2026.

Penetapan yang dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat pleno organisasi ini menjadi agenda penutup Jamnas V BPAN yang mempertemukan ratusan pemuda adat dari tujuh Region Nusantara di wilayah adat Perigi dan Limbungan, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Ketua Umum BPAN terpilih Elisabeth Simanjuntak menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi pemuda adat ini. Ia menegaskan kepemimpinannya akan dijalankan secara kolektif bersama seluruh pengurus dan anggota BPAN.

"Tanggung jawab menjalankan organisasi ini bukan hanya berada di pundak Ketua Umum, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua sebagai anggota BPAN," ujarnya sesaat setelah dipercaya menjabat Ketua Umum BPAN.



Elisabeth Simanjuntak terpilih sebagai Ketua Umum BPAN periode 2026–2030.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



Elisabeth mengajak seluruh kader BPAN merapatkan barisan untuk menjalankan berbagai mandat organisasi selama empat tahun ke depan, termasuk mengawal hasil-hasil Jambore Nasional serta memperkuat perjuangan menjaga dan mengelola wilayah adat.

"Mari kita refleksikan kembali tujuan organisasi kita. Tugas terbesar kita adalah menjaga dan mengurus wilayah adat. Itu hanya bisa diwujudkan jika kita saling bahu-membahu demi masa depan Masyarakat Adat yang lebih baik," tegasnya.

Elisabeth berasal dari komunitas Turunan Op. Ronggur Simanjuntak, Sumatera Utara. Sebelum terpilih sebagai Ketua Umum BPAN, ia mengemban amanah di Sekretariat Nasional BPAN periode 2024–2026 di Bidang Administrasi dan Keuangan.

Amanah dari Leluhur

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi menyatakan kepemimpinan dalam organisasi bukan sekadar jabatan, melainkan amanah dari tanah leluhur dan seluruh Masyarakat Adat Nusantara. Karena itu, setiap mandat harus dijalankan dengan ketulusan, semangat belajar, dan kerja kolektif.

"Selamat kepada Elisabeth Simanjuntak terpilih sebagai Ketua Umum BPAN. Ini amanah dari tanah leluhur, semoga Pencipta dan leluhur Masyarakat Adat selalu menolongmu," kata Rukka dalam sambutannya saat menutup Jamnas V BPAN pada Kamis, 2 Juli 2026.



Ketua Umum BPAN terpilih Elisabeth Simanjuntak (tengah) photo bersama Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi usai penutupan Jamnas V BPAN.

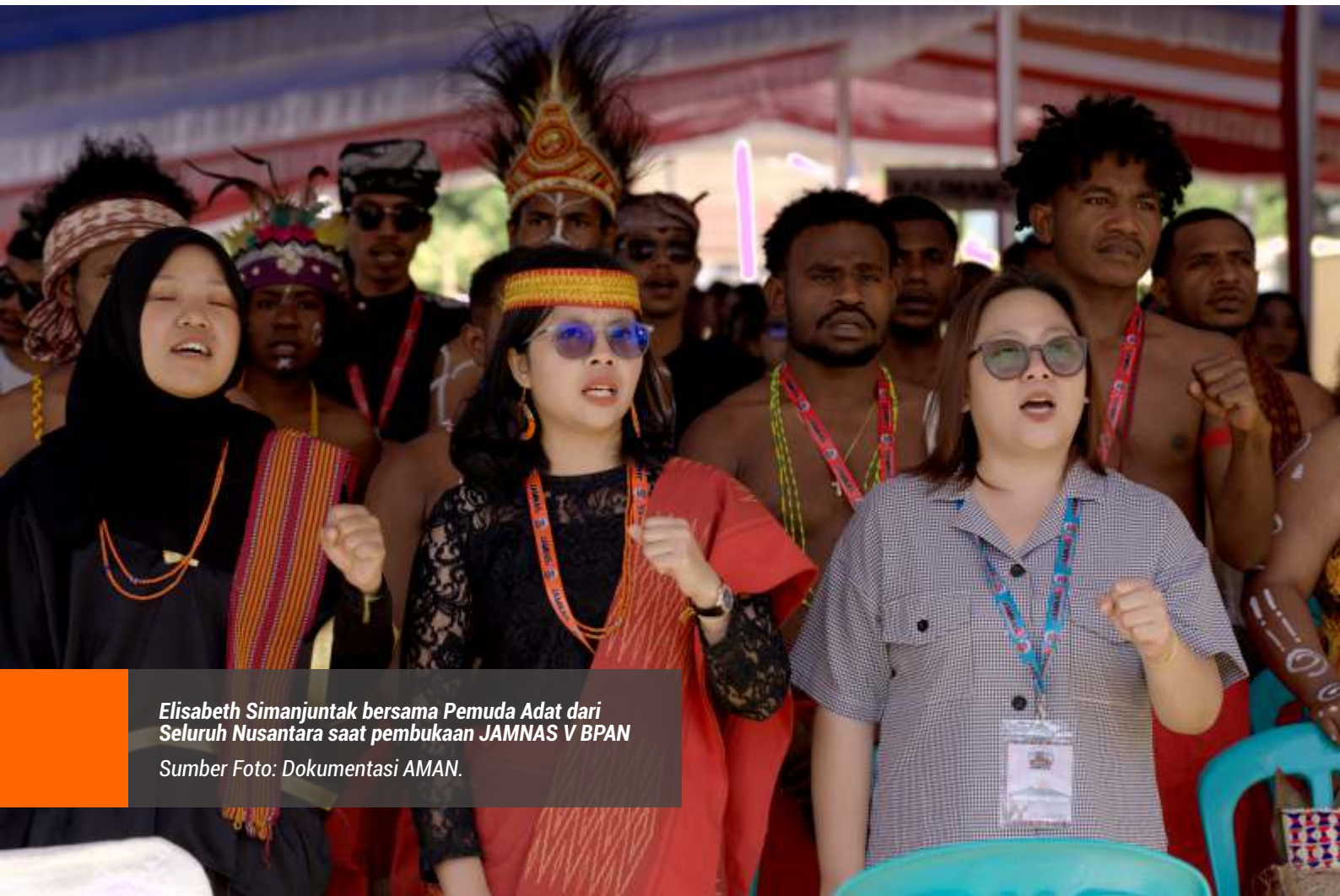
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.

Rukka menyatakan tantangan pemuda adat ke depan sangat besar. Karena itu, ia berharap Ketua Umum BPAN terpilih dapat merangkul sebanyak mungkin pemuda adat dari kampung-kampung guna menjawab tantangan tersebut. Menurutnya, generasi muda adat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai ketidakadilan yang masih dihadapi Masyarakat Adat.

"Pemuda harus memutuskan mata rantai penjajahan dan ketidakadilan. Mereka yang akan memimpin kita melangkah ke masa depan," ujarnya, seraya menambahkan bahwa perjuangan pemuda adat tidak hanya menyangkut masa depan komunitas Masyarakat Adat, tetapi juga masa depan bumi beserta seluruh isinya.

Pada kesempatan ini, Rukka menyampaikan apresiasi kepada Masyarakat Adat Perigi dan Limbungan atas sambutan hangat selama penyelenggaraan Jamnas V BPAN.

"Berdaulat, mandiri, dan bermartabat merupakan kenyataan yang bisa kita lihat di wilayah adat Perigi dan Limbungan. Terima kasih atas seluruh kasih sayang, makanan, dan penerimaan yang kami rasakan selama berada di sini," tutupnya.



*Elisabeth Simanjuntak bersama Pemuda Adat dari Seluruh Nusantara saat pembukaan JAMNAS V BPAN
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.*



Konsolidasi Wilayah Adat Sa'dan dan Pangala' Sukseskan KMAN VII di Tana Toraja

Oleh: **Arnol Prima Burara**,
Jurnalis Masyarakat Adat di Tana Toraja.

Menjelang pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VII di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, berbagai upaya persiapan mulai dilakukan di berbagai komunitas Masyarakat Adat di Toraja.

Persiapan tidak hanya terfokus pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga pada penguatan pemahaman bersama mengenai arti penting kongres sebagai ruang pengambilan keputusan tertinggi bagi gerakan Masyarakat Adat di Nusantara.

Masyarakat Adat Sa'dan menggelar musyawarah adat bersama tokoh adat, perempuan adat, pemuda, & berbagai unsur masyarakat untuk mempersiapkan diri sebagai tuan rumah sarasehan KMAN VII.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.





Sejumlah wilayah adat mulai menyusun rencana dengan melibatkan seluruh unsur Masyarakat Adat untuk memastikan partisipasi aktif dalam agenda nasional tersebut. Dua di antaranya adalah wilayah adat Sa'dan dan wilayah adat Pangala', yang sama-sama telah bergerak menyiapkan diri sebagai tuan rumah rangkaian sarasehan KMAN VII.

Salah satu komunitas yang telah memulai persiapan KMAN VII adalah wilayah adat Sa'dan, yang berada di bagian utara Kabupaten Toraja Utara. Pada 27 Juni lalu, Masyarakat Adat menggelar musyawarah di Sa'dan To' Barana' yang mempertemukan tokoh adat, perempuan adat, pemuda, serta berbagai unsur Masyarakat Adat lainnya.

Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam membangun kesepahaman mengenai peran wilayah adat Sa'dan sebagai salah satu lokasi sarasehan KMAN VII.

Saatnya Untuk Mensukseskan KMAN VII

Ketua Masyarakat Adat Sa'dan, Lewaran Rantela'bi' menjelaskan mereka telah melaksanakan musyawarah persiapan KMAN VII untuk menyatukan persepsi seluruh komponen Masyarakat Adat agar memiliki pemahaman yang sama terhadap kongres. Menurutnya, persiapan yang dilakukan dalam bentuk konsolidasi sejak awal ini menjadi kunci agar seluruh Masyarakat Adat mengetahui agenda, memahami substansinya, dan terlibat dalam setiap tahapan persiapan kongres.

"Persiapan sudah mulai dilakukan, saatnya untuk mensukseskan KMAN VII. Kongres ini momen penting bagi Masyarakat Adat Toraja selaku tuan rumah, khususnya wilayah adat Sa'dan," kata Lewaran disela pelaksanaan musyawarah di Sa'dan To'Barana.



Para tokoh Masyarakat Adat Pangala lakukan konsolidasi untuk kukuhkan komitmen bersama demi menyukseskan sarasehan KMAN VII di Tongkonan To'Batatta.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



Masyarakat Adat Sa'dan menggelar musyawarah adat bersama tokoh adat, perempuan adat, pemuda, & berbagai unsur masyarakat untuk mempersiapkan diri sebagai tuan rumah sarasehan KMAN VII.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



Ia menjelaskan dalam musyawarah ini, mereka membahas kesiapan menjadi tuan rumah kegiatan sarasehan KMAN VII yang akan dilaksanakan di wilayah adat Sa'dan. Selain itu, dalam musyawarah ini juga mereka menyepakati untuk mengusulkan nama calon yang akan diusung menjadi Sekretaris Jenderal AMAN dan Dewan AMAN Nasional. Lewaran menyebut untuk mensukseskan seluruh agenda kongres, mereka akan bekerjasama dengan pemerintah, gereja, dan tokoh-tokoh agama lainnya untuk mensosialisasikan pelaksanaan KMAN VII kepada masyarakat.

Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja itu menegaskan bahwa KMAN VII bukan sekadar agenda seremonial yang berlangsung lima tahunan. Menurutnya, setiap keputusan yang lahir dari kongres akan menentukan arah perjuangan Masyarakat Adat dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perlindungan wilayah adat, pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, hingga penguatan organisasi Masyarakat Adat di tingkat nasional. Karena itu, imbuhnya, seluruh persiapan harus dilakukan secara matang melalui kerjasama seluruh elemen masyarakat.



Sa'dan To'barana adalah kampung sentra tenun, salah satunya ada di Tongkonan Ponglabba. Dari sinilah kain tenun Toraja berkembang hingga dikenal dunia.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



"Kongres ini agenda yang sangat penting untuk kita sukseskan bersama karena di forum ini akan ditentukan arah perjuangan Masyarakat Adat ke depan," tegasnya.

Bagi Masyarakat Adat, kata Lewaran, KMAN VII memiliki makna yang jauh melampaui pergantian kepengurusan organisasi atau pembahasan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMAN. Disebutnya, kongres ini merupakan forum tertinggi tempat Masyarakat Adat dari berbagai penjuru Nusantara mengevaluasi situasi nasional, merumuskan sikap politik organisasi, menetapkan arah gerakan lima tahun ke depan, serta menyusun strategi bersama dalam memperjuangkan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat.

Lewaran berharap melalui konsolidasi yang mulai dilakukan di wilayah adat Sa'dan, muncul semangat dari akar komunitas untuk mensukseskan KMAN VII.

"Persiapan yang mulai dibangun melalui musyawarah, pelibatan perempuan, pemuda, tokoh adat, pemerintah, dan tokoh lintas agama menjadi cerminan bahwa kongres ini bukan hanya milik organisasi, melainkan milik seluruh Masyarakat Adat," tutupnya.

Semangat konsolidasi yang sama juga tumbuh di wilayah adat Pangala', yang turut dipercaya menjadi salah satu lokasi pelaksanaan sarasehan KMAN VII.



Wilayah adat Pangala' di Tongkonan To' Batatta, Kampung Kalimbuang, Kecamatan Kapala Pitu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan ditunjuk menjadi salah satu lokasi pelaksanaan sarasehan di Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VII pada Maret 2027 mendatang.

Penunjukan ini merupakan kehormatan bagi Masyarakat Adat Pangala', sekaligus kebanggaan karena dapat menjadikan momentum KMAN VII untuk memperkenalkan kekayaan budaya, sejarah, serta potensi alam kepada Masyarakat Adat yang datang dari berbagai penjuru Nusantara.

Esni Pakendek, salah seorang keluarga dari rumpun Tongkonan To' Batatta menyambut baik penunjukan tongkonan mereka sebagai lokasi pelaksanaan sarasehan. Baginya, kepercayaan tersebut merupakan kehormatan sekaligus kesempatan untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya Toraja kepada para peserta KMAN VII.

"Kami sangat bersyukur dan menyambut baik Tongkonan To' Batatta dipercaya menjadi lokasi sarasehan KMAN VII," katanya dengan wajah sumringah pada Kamis, 30 Juli 2026.

Esni mengatakan sebagai warga Kalimbuang, khususnya keluarga besar Tongkonan To' Batatta, mereka akan menyiapkan berbagai kebutuhan dasar peserta KMAN VII yang akan hadir di sarasehan nanti. Kebutuhan dasar tersebut meliputi penyediaan air bersih, fasilitas MCK, tempat menginap, serta kebutuhan lain yang diperlukan selama kegiatan berlangsung.

"Kami berharap peserta KMAN VII nanti bisa tinggal dengan nyaman selama berada di wilayah adat Pangala'," kata Esni.

Ketua Masyarakat Adat Pangala' Paul Rassi Pongbulaan mengatakan masyarakat telah berkomitmen akan mempersiapkan acara sarasehan nanti secara maksimal. Paul Rassi menyatakan sebagai tuan rumah sarasehan, mereka terus berkoordinasi dengan Pengurus Harian Daerah AMAN Toraya, panitia KMAN VII serta pemerintah setempat agar seluruh kebutuhan pelaksanaan kegiatan dapat terpenuhi dengan baik.

"Kami akan melakukan yang terbaik untuk peserta KMAN VII, kiranya pelaksanaan sarasehan di tempat kami nanti berjalan lancar," ujarnya.

Paul Rassi mengakui pada saat kombongan atau rapat adat beberapa waktu lalu, mereka mengusulkan agar wilayah adat Pangala' bisa menjadi lokasi pelaksanaan sarasehan. Usulan tersebut diterima, lalu diputuskan Pangala' menjadi salah satu tuan rumah sarasehan KMAN VII.

"Kami mulai melakukan berbagai persiapan setelah dipercaya menjadi tuan rumah sarasehan. Semoga pelaksanaan sarasehan nanti berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi Masyarakat Adat peserta KMAN VII, juga bagi Masyarakat Adat Pangala' secara umum," ungkap Paul Rassi.

Disebutnya, pengurus Masyarakat Adat Pangala' telah mensosialisasikan pelaksanaan sarasehan ini kepada warga sekitar. Sosialisasi tersebut bertujuan membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya kegiatan ini, sekaligus mengajak seluruh Masyarakat Adat berpartisipasi dalam menyukseskan sarasehan KMAN VII di wilayah adat Pangala'.





Paduan Nilai Budaya dan Keindahan Alam

Wilayah adat Pangala' dapat ditempuh dari Kota Rantepao dalam waktu sekitar 45 menit. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu sentra penghasil kopi arabika berkualitas di Toraja. Selain itu, wilayah adat Pangala' juga memiliki panorama alam pegunungan yang sejuk serta bentang alam yang masih asri. Kekayaan alam ini menjadikan wilayah adat Pangala' sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Toraja Utara.

"Pangala'" sendiri memiliki makna yang erat kaitannya dengan sejarah perjalanan leluhur Masyarakat Adat setempat. Berdasarkan cerita leluhur, nenek moyang Masyarakat Adat Pangala' berasal dari wilayah Kesu' dan Tikala. Dalam perjalanan mencari tempat bermukim, mereka menemukan sebuah lembah datar yang dikelilingi hutan lebat di kawasan pegunungan. Tempat itu kemudian dinamai "Pangala'", yang berarti hutan, sebagai penanda hubungan erat antara masyarakat dengan alam yang menjadi sumber kehidupan mereka sejak dahulu.

Lebih dari sekadar menjadi tempat penyelenggaraan sarasehan, wilayah adat Pangala' menawarkan pengalaman yang mempertemukan nilai budaya dengan keindahan alam. Berada pada kawasan dataran tinggi dengan suhu berkisar antara 18 hingga 20 derajat celsius, wilayah adat ini dilapisi udara yang sejuk dan panorama pegunungan yang memikat. Wilayah adat ini kerap dijuluki sebagai "negeri di atas awan".

Masyarakat Adat Pangala' tetap menjaga kelestarian hutan adat, lahan pertanian, serta tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini menjadi kekuatan utama yang menjadikan Pangala' tidak hanya layak sebagai lokasi sarasehan, tetapi juga sebagai ruang belajar tentang bagaimana Masyarakat Adat mempertahankan identitas, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, dan menjaga harmoni antara manusia, budaya, dan alam.

Dari Sa'dan hingga Pangala', konsolidasi yang tumbuh di akar komunitas ini menegaskan satu hal: kesuksesan KMAN VII bukan semata tanggung jawab panitia, melainkan buah kerja bersama seluruh Masyarakat Adat Toraja sebagai tuan rumah.

Bentang alam Wilayah Adat Pangala yang asri dengan hamparan hutan & pegunungan adalah kekayaan alam yang akan diperkenalkan pada peserta KMAN VII.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.





SEMANGAT PEMUDA ADAT DI JAMNAS V BPAN

Oleh: Tim Infokom PB AMAN

Di bawah langit Lombok Timur, semangat Pemuda Adat berkumpul dalam satu barisan langkah pada 29 Juni–2 Juli 2026, melaksanakan Jambore Nasional (JAMNAS) V Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) di Wilayah Adat Perigi dan Limbungan, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Rangkaian JAMNAS V BPAN diawali dengan prosesi sakral Ritual Tetulak Desa, yang dipimpin kepala desa bersama para tetua adat sebagai doa restu dan simbol penjagaan alam serta pewarisan nilai budaya kepada generasi muda sebelum jambore dimulai. Semangat itu kemudian mengalir dalam kirab pembukaan, di mana ribuan pemuda adat dari berbagai wilayah di Nusantara turun ke jalan membawa spanduk dan poster bertuliskan #SahkanUUMasyarakatAdat, menyuarakan urgensi pengesahan RUU Masyarakat Adat yang hingga kini masih tertunda meski telah dua dekade lebih diperjuangkan. Rangkaian acara JAMNAS V BPAN turut dimeriahkan penampilan seni bela diri tradisional *Peresean* yang memukau penonton di tengah lapangan.

Foto-foto ini menggambarkan bagaimana JAMNAS V BPAN menjadi ruang pertemuan antara perjuangan advokasi, pelestarian tradisi, dan konsolidasi pemuda adat dari seluruh penjuru Nusantara, sebuah momentum penegasan bahwa masa depan masyarakat adat ada di tangan generasi mudanya.

Peserta kirab membentangkan poster bertuliskan peringatan bahwa RUU Masyarakat Adat yang tak kunjung disahkan berarti mengabaikan nasib Masyarakat Adat.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.





*Delegasi Kalimantan turut ambil bagian dalam kirab, mengusung spanduk Sahkan Undang-Undang Masyarakat Adat di sepanjang rute kirab.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.*





Delegasi Bali Nusra mengikuti kirab dengan membawa poster #SahkanUUMasyarakatAdat, menyerukan urgensi pengesahan RUU Masyarakat Adat.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.





Dua petarung beradu ketangkasan dalam pertunjukan Peresean, seni bela diri tradisional yang menghadirkan keberanian leluhur di tengah lapangan JAMNAS V BPAN. Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



*Kepala desa bersama para tetua adat memimpin prosesi sakral Ritual Tetulak Desa sebagai doa restu dan simbol pewarisan budaya kepada generasi muda.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.*



*Warga dan peserta JAMNAS duduk berjajar mengelilingi dulang sesaji menjelang pelaksanaan Ritual Tetulak Desa.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.*





Kirab budaya menampilkan pakaian adat khas berbagai daerah, dari Sumatera hingga Papua, dalam iringan langkah penuh warna.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.





*PJ Ketua Umum BPAN 2022–2026, Hero Aprila turut berpartisipasi dalam laga Peresean.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.*



*Sabetan penjalin dan tangkisan perisai mewarnai laga Peresean, simbol keteguhan dan keberanian masyarakat adat Lombok.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.*



Semangat kirab budaya JAMNAS V menular hingga ke anak-anak dari wilayah adat Perigi dan Limbungan yang antusias mengiringi setiap langkah rombongan.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



*Pemuda Adat Lombok membawakan
kesenian Gendang Beleg dalam
Kirab Budaya JAMNAS V
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.*





LAPORAN KEUANGAN ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA per 30 Juni 2026

Penerimaan Dana	Jumlah
The Tenure Facility	7.611.843.514,35
NICFI	5.661.215.364,92
SKOLL Award	2.698.832.410,18
OSF - AMAN	7.014.258,68
CLUA - FPCI	23.779.903.386,70
CLUA - Michigan	726.422.336,00
Thousand Currents	3.677.221.808,98
NDI	450.358.246,53
Pawanka Wayfinders	666.512.103,00
The Christensen Fund	2.142.668.013,00
Packard	3.264.722.475,00
Saldo	47.421.991.442,34
Dana luran dan Sumbangan-sumbangan	
Dana luran kader dan Komunitas Anggota AMAN	271.390.312,07
Donasi (Penggalangan Dana Mandiri)	100.948.153,99
Dana Organisasi per 30 April 2025	
Kas	10.000.000,00
KMAN VII	550.000.000,00
Dana Organisasi	3.777.319.744,00
Dana Resiliancy	5.058.636.442,37
Dana Tanggap Darurat	4.731.619.742,02



**Laporan Keuangan
Tanggap Darurat/
Emergency Respond (ER)
Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara (AMAN)**

per 30 Juni 2026

Saldo menurut bank Per 31 Desember 2019		504.184.783,76
Tanggal	Penerimaan	Jumlah
20 April 2020	Tamalpais Trust Fund	764.770.500
4 Mei 2020	Pawanka Foundation	439.280.250
23 Juni 2020	Tebtebba Foundation (ER)	209.040.750
10 Juli 2020	AVAAZ Foundation	1.061.037.750
18 September 2020	Rainforest Foundation US (ER)	712.892.376
27 Oktober 2020	IFAD	33.960.000
16 Desember 2020	Ashden Trust	101.953.500
24 Februari 2021	Pawanka Foundation - Wayfinder	8.716.875
12 April 2021	CLUA	68.122.729
27 Juli 2021	SAMDHANA	43.500.000
13 Agustus 2021	Tamalpais Trust Fund	706.834.950
25 Agustus 2021	Ashden Trust	773.560.000
10 September 2021	CLUA	52.968.750
22 Oktober 2021	Pawanka Foundation	694.346.700
8 November 2021	Packard	5.659.759.450
29 Juni 2022	Skoll	171.250.000
5 Juli 2022	Pawanka Wayfinder	17.733.315
17 Oktober 2022	Pawanka Wayfinder	756.250.000
14 Desember 2022	Tenure Facility	498.244.499
14 Maret 2023	Skoll	866.000.000
14 Maret 2023	Ballmer	2.238.445.800
20 September 2023	Wikimedia	73.994.450
6 Desember 2023	Tenure Facility	516.069.260
31 Januari 2024	Clarifi	150.000.000
3 April 2024	Silicon Valley	29.777.000
29 April 2024	Nia Tero	18.750.000
13 September 2024	Matata	3.000.000
19 Oktober 2024	Tenure Facility	582.687.360
13 September 2024	Pawanka	19.250.000
13 Januari 2025	NDI	61.625.000
6 Juni 2025	Niaterro	3.999.439
Total Dana ER AMAN		17.842.005.486
Pengeluaran per 30 Juni'25		13.110.385.744
Sisa dana menurut bank Per 30 Juni 2025		4.731.619.742
Biaya-biaya berupa Pembelian APD, logistik, barter, konsumsi staf, Kader, relawan, Unit Tanggap Darurat (UTD) AMAN, pembuatan masker, pembuatan handsanitizer, Disinfektan, tempat cuci tangan, publikasi, komunikasi, dan kedaulatan pangan dll terkait penanggulangan COVID19 dan Dukungan-dukungan Tanggap darurat Bencana alam, dan lain-lain		



Laporan Iuran Komunitas Masyarakat Adat Anggota AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)

April - Juni 2026

Nama Kader	Iuran Kader	Nama Kader	Iuran Kader
Sahran	24.000	Muhammad Said	24.000
Arnol Prima Burara	72.000	H.Muhammad	24.000
Muhammad Hazmin	24.000	Yufriani	24.000
Hadial Putra	24.000	Fatimah	24.000
Indra Mustika	24.000	Al.Muhajirin	24.000
Eri Deka Gustiar	24.000	M.Natsir	24.000
M. Alvin	24.000	Muhsanan	24.000
Do'l Saputra	24.000	Fahmi	50.000
Iqbal Kaliparajo	24.000	Irwan	48.000
Suheri	24.000	Wahid	48.000
Irayanti	24.000	Ahri	25.000
Rustam Sb Rauf	24.000	Nursia	25.000
Padriawan	24.000	Lincewati	48.000
Jasrul	24.000	Isang	48.000
Heni Puspa Dewita	24.000	Dores	24.000
Akbar	24.000	Indra	24.000
Ilham Kurniawan	24.000	Petrus	120.000
Khairul	24.000	Dian Utami	120.000
Susan	24.000	Kesiadi	48.000
Yuliarti	24.000	Mustaqim	48.000
Laila Kadarni	24.000	Alqadri Arsyad	48.000
Rima Fitriana	24.000	Rudi	48.000
Bili	24.000	Asfar Zulhijjah Ar	48.000
Azhar	24.000	Muh. Fahri	48.000
Efi Puspita	24.000	Asdar	48.000
Idris	24.000	Muh. Akbar	48.000
Ade Irawan	25.000	Ramli	48.000
Parafu Casama	50.000	Muhlis	48.000
Arahman	100.000	Muliyati Dg Nginga	48.000
A Rahim	24.000	Abdul Gani	48.000
Suparman	50.000	Muswahyuddin	48.000
Sri Rahmawati	24.000	Nurfadillah	48.000
H. Mahmud	24.000	Basri	48.000
M.Said	24.000		



Laporan Iuran Kader Komunitas Masyarakat Adat Anggota AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)

April - Juni 2026

Nama Komunitas	Iuran Komunitas
Huta Lontung	120.000
Binua Sengkunang	360.000
Nanggala	120.000
Balepe'	120.000
Balla	120.000
Balusu	120.000
Banga	120.000
Bau	120.000
Bittuang	120.000
Buakayu	120.000
Buntao	120.000
Dende	120.000
Kesu'	120.000
Kurra	120.000
Madandan	120.000
Makale	120.000
Malimbong	120.000
Mappa'	120.000
Mengkendek	120.000
Palesan	120.000
Pali	120.000
Pangala'	120.000
Piongan	120.000
Rano	120.000
Rantebua	120.000
Sa'Dan	120.000
Sangalla'	120.000
Se'Seng	120.000
Simbuang	120.000
Talion	120.000

Nama Komunitas	Iuran Komunitas
Tapparan	120.000
Tikala	120.000
Tondon	120.000
Ulusalu	120.000
Depati Rencong Telang	120.000
Depati Biang Sari	120.000
Depati Atur Bumi	120.000
Depati Intan	120.000
Puncak Negeri	120.000
Depati Payung	120.000
Padun Gelanggang Bs	120.000
Depati Muara Langkap	120.000
Duo Nenek Rawang	120.000
Koto Payung St	120.000
Depati VII	120.000
Depati Kuning	120.000
Piri Ta'A	120.000
Tarlawi	120.000
Sambori	240.000
Tumbang Rungan	120.000
Karamuan	120.000
Bulutana	120.000
Balassuka	120.000
Suka	120.000
Pattallasang	120.000
Bolaromang	120.000
Matteko	120.000
Teko	120.000
Baliti	120.000
Rappo Gallang	120.000

GENUS COFFEE & BOUTIQUE

Coffee Booth Genus

Bawa kenikmatan kopi premium ke momen spesial Anda, seperti: pernikahan, lamaran, atau ulang tahun, dengan biji kopi pilihan dari Wilayah Adat nusantara.

Harga Spesial Rp 1.900.000
(Normal Rp 2.499.000) sudah termasuk:

- 100 cups Kopi Genus
- Barista profesional & premium booth
- Free delivery Kota Bogor

Pemesanan & info: 0811-1110-0427



GENUS by AMAN adalah ruang temu yang menghubungkan produk Masyarakat Adat dengan gaya hidup modern melalui konsep *coffee shop*, *roastery*, dan *craft store*. Sebagai “*Rumahnya Produk Masyarakat Adat*”, *GENUS (Gerai Nusantara)* menghadirkan pilihan terbaik seperti tenun, anyaman, kopi, madu hutan, dan gula aren, termasuk produk inovatif yang dikemas kekinian untuk kebutuhan sehari-hari.



Instagram
@gerainusantara_aman

Info & Reservasi
0811-1113-237 0427

Jl. Raya Cifor No. 8,
Situ Gede, Kota Bogor

GENUS COFFEE & BOUTIQUE

Paket Souvenir & Hampers Gerai Nusantara



Lengkapi meeting, acara, atau momen spesial Anda dengan souvenir dan hampers eksklusif dari koleksi Gerai Nusantara, produk Masyarakat Adat penuh makna dan cerita.

Harga fleksibel bisa disesuaikan budget Anda.
Pemesanan & info: 0811-1113-237

GENUS by AMAN adalah ruang temu yang menghubungkan produk Masyarakat Adat dengan gaya hidup modern melalui konsep coffee shop, roastery, dan craft store. Sebagai "Rumahnya Produk Masyarakat Adat", GENUS (Gerai Nusantara) menghadirkan pilihan terbaik seperti tenun, anyaman, kopi, madu hutan, dan gula aren, termasuk produk inovatif yang dikemas kekinian untuk kebutuhan sehari-hari



Instagram
[@gerainusantara_aman](https://www.instagram.com/gerainusantara_aman)



Info & Reservasi
0811-1113-237



Jl. Raya Cifor No. 8,
Situ Gede, Kota Bogor

WILAYAH ADAT ADALAH BENTENG KESELAMATAN BUMI DARI KRISIS IKLIM YANG MELANDA

Nusantara kita terdiri dari bermacam-macam suku yang tersebar di ribuan pulau, disana terdapat ribuan Komunitas Masyarakat Adat yang hidup dan menjaga Wilayah Adat sebagai ruang hidup. Masyarakat Adat masih menjalankan tradisi dan budaya yang telah diwariskan bergenerasi-generasi lamanya, secara lestari tanpa merusak bumi, planet kita satu-satunya, rumah kita semua.

Masyarakat Adat telah berperan penting dalam menjaga lestarnya bumi selama bermilenia lamanya, menjaga bumi terhindar dari berbagai bencana ekologi, terlebih saat bumi kita saat ini berada dalam krisis iklim parah akibat keserakahan korporasi & negara.

Wilayah adat bukan hanya ruang hidup bagi Masyarakat Adat tapi juga sebagai benteng pengaman keselamatan kehidupan di planet ini dari marabahaya yang timbul akibat krisis iklim yang melanda. Selain itu wilayah adat juga adalah penghasil bahan pangan, obat-obatan, oksigen bagi kita semua, sekaligus rumah bagi ribuan spesies flora & fauna yang terancam punah.

Kita bisa memulai langkah kecil dengan mendukung Masyarakat Adat untuk terus melestarikan wilayah adatnya, baik itu hutan, bukit, gunung, sungai, hingga lautannya, agar krisis iklim yang kini melanda dapat kita lawan bersama.

Jadilah DerMA (Dermawan Masyarakat Adat) dengan berdonasi melalui :

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA
Bank MANDIRI KCP PEJATEN, JAKARTA
Nomor Rekening : 127 - 000 - 657 - 090 - 5

Terimakasih telah bersedia berdonasi dan mendukung Masyarakat Adat merawat dan menjaga wilayah adatnya, karena keselamatan Bumi ada ditangan kita semua.

